



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI**

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI**



TAHUN 2025

D u m a i , 2 0 2 4



0811 7771 256



dinkes.dumaikota.go.id



Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar - Dumai



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 276 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2024.
- (4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2025; dan
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 3

Penjabaran RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. AB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Juni 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Juni 2024

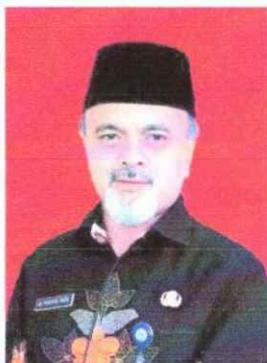
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI D

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 yang berisi tentang Rencana Kegiatan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2025 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di bidang kesehatan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) yang disusun pada setiap tahunnya. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Dumai untuk Tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terimakasih.

Dumai, Juli 2024

**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai**



dr. SYAIFUL, M.KM
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 197107242001121004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Renja s.d Triwulan II Tahun 2024.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	59
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	63
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	67
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan.....	68
3.3 Program dan Kegiatan.....	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	77
4.1 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	77
4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025...	78
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	82
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	83
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1 Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2023	21
Grafik 2.2 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2023.....	21
Grafik 2.3 Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023	22
Grafik 2.4 Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023	23
Grafik 2.5 Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023	24
Grafik 2.6 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023	24
Grafik 2.7 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023	25
Grafik 2.8 Pencapaian Umur Harapan Hidup di Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	26
Grafik 2.9 Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023	27
Grafik 2.10 Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	28
Grafik 2.11 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023.....	29
Grafik 2.12 Jumlah Kasus TB Paru BTA+ Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	29
Grafik 2.13 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023	31
Grafik 2.14 Data Kumulatif Kasus HIV Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023.....	32
Grafik 2.15 Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023.....	33
Grafik 2.16 Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	34
Grafik 2.17 Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	35

Grafik 2.18	Jumlah Kasus Balita Dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	36
Grafik 2.19	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	37
Grafik 2.20	Jumlah Kasus Balita Dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	38
Grafik 2.21	Pencapaian Prevalensi Stunting Pada Balita Kota Dumai Dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	40
Grafik 2.22	Jumlah Kasus Balita Stunting Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	40
Grafik 2.23	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2020 – 2023.....	42
Grafik 2.24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	47
Grafik 2.25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	47
Grafik 2.26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	49
Grafik 2.27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	50
Grafik 2.28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	51
Grafik 2.29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	52
Grafik 2.30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	53
Grafik 2.31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	54
Grafik 2.32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	55
Grafik 2.33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	56
Grafik 2.34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	57
Grafik 2.35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	58



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah harus selaras dengan tujuan pembangunan Nasional, sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu perencanaan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengacu pada pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Perangkat Daerah salah satunya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Dumai yakni sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2025. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Dumai Tahun 2025 dan mempedomani pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah diminta untuk segera menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA perangkat daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021- 2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025.

Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 juga disusun mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKP 2025 menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. RKP 2025 menjadi panduan atau acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
2. Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan yaitu:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2023;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019-2024;
 17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)

19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D)
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E)
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri D)
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E)
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 8 Seri D)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 adalah: (a) Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; (b) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada periode Tahun 2025; (c) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini berisi tentang reuiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 dan pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai, dan program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sesuai yang tertuang pada hasil cetak SIPD-RI.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA S.D
TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 dan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai s.d Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 dianalisa dengan membandingkan hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 terdiri dari 5 program (1 program rutin dan 4 program wajib), 22 kegiatan dan 95 sub kegiatan. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan periode tahun pertama Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adanya pengurangan program pada Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 yakni Program Pengelolaan Barang Milik Daerah karena berdasarkan hasil review program tersebut merupakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga kegiatan pengelolaan barang milik daerah dan sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dihapuskan pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022. Sub kegiatan yang juga dihapus pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan karena berdasarkan hasil rewiuw sub kegiatan tersebut hanya untuk kendaraan dinas Walikota Dumai. Selain itu pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 ada penambahan sub kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Renja Dinas Kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 terdiri dari 5 program, 24 kegiatan dan 93 sub kegiatan dengan perincian: Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan; dan Program Urusan Wajib terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Dengan demikian pada tahun 2023 ada penambahan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai terkait Pemberlakuan Kebijakan Pusat tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor RI PR.01.01//10217/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023, ada 24 sub kegiatan hasil Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 yang dijadikan acuan dalam penyusunan penganggaran kegiatan bersumber DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dalam APBD Tahun 2023. Hasil pemetaan menunjukkan dari 23 sub kegiatan yang ada pada menu DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023, sebanyak 21 sub kegiatan atau sebesar 91.30% sudah ada pemetaannya pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan demikian ada 2 sub kegiatan lain yakni Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota belum terpetakan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.

Sementara Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 disusun mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tersebut, maka ada perubahan kode dan perubahan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 (pengurangan jumlah sub kegiatan karena ada sub kegiatan yang dihapus, dimerger atau diganti dengan sub kegiatan baru). Selain itu ada pemberlakuan keseragaman satuan, indikator dan kinerja penunjang urusan menyebabkan dilakukannya penyesuaian satuan, indikator dan kinerja kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 dan penyesuaian Kodifikasi dan Nomenklatur sub kegiatan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota

Dumai Tahun 2023 menunjukkan bahwa total rata-rata capaian kinerja sebesar 74.50% dengan predikat kinerja sedang dan capaian realisasi anggaran dari seluruh sebesar 91.94%. Sedangkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 menunjukkan bahwa total rata-rata capaian kinerja sebesar 94.92% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran dari seluruh sebesar 91.72%. Dengan demikian, ada penurunan pencapaian kinerja pada tahun 2023, namun disisi lain ada sedikit peningkatan capaian realisasi anggaran pada tahun 2023. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran tabel T-C 29.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 telah ditetapkan pagu Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 sebesar Rp 146.731.802.600,-. Namun berdasarkan hasil pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2024 antara Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai ada kebijakan pengurangan anggaran perjalanan dinas di setiap perangkat daerah, sehingga pagu Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 berkurang menjadi sebesar Rp 146.531.802.600,- atau ada pengurangan anggaran sebesar Rp 200.000.000,-. Dalam perjalanannya anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 beberapa kali mengalami pergeseran. Pada pergeseran kedua APBD Kota Dumai per 1 Maret 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Dumai bertambah menjadi Rp 217.593.388.440,-. Selanjutnya pada pergeseran ketiga APBD Kota Dumai per 28 Maret 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Dumai bertambah menjadi Rp 233.707.394.142,-. Kemudian pada pergeseran kelima APBD Kota Dumai per Mei 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Dumai berkurang menjadi Rp 232.168.177.067,-. Anggaran pergeseran tersebut terdiri dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 210.094.980.957,- (ada penambahan DAK Fisik dan Non Fisik Dinas Kesehatan sebesar Rp 8.749.174.444,- dan penambahan APBD sebesar Rp 69.898.362.023,-) dan anggaran BLUD Puskesmas se Kota Dumai dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 22.073.196.110,- (ada penambahan DAK Non Fisik BOK puskesmas sebesar Rp 6.988.838.000,-). APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 terdiri dari 5 Program (1 program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 4 program urusan pemerintahan wajib), 23 Kegiatan (9 kegiatan rutin dan 14 kegiatan wajib) dan 91 sub kegiatan (39

sub kegiatan rutin dan 52 sub kegiatan wajib).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2024 (berdasarkan pergeseran ketujuh per Juni 2024) menunjukkan bahwa dari total Rp 232.168.177.067,- anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai telah terealisasi sebesar Rp 86.217.797.887,14 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 37,14% dengan predikat kinerja sangat rendah. Berdasarkan unit kerja, dari total Rp 210.094.980.957,- anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai telah terealisasi sebesar Rp 76.413.014.780,14 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 36,37% dengan predikat kinerja sangat rendah dan capaian kinerja sebesar 36,37% dengan predikat kinerja sangat rendah. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai tersebut atau belum mencapai 50% karena proses pembayaran beberapa kegiatan dilaksanakan di bulan Juli 2024, ada beberapa kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan atau baru akan dilaksanakan setelah triwulan II, ada beberapa kegiatan belum terlaksana karena menunggu proses perubahan APBD Tahun 2024, ada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses pelaksanaan atau dalam proses sistem LPSE (proses validasi dan verifikasi data SIRUP). Beberapa kegiatan Dinas Kesehatan bersumber dana BOK baru bisa dilaksanakan setelah mendapat konfirmasi jadwal yang ditentukan oleh Bapelkes sebagai pihak dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk anggaran BLUD Puskesmas se Kota Dumai dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 22.073.196.110,- sampai dengan bulan Juni 2024 baru terealisasi sebesar Rp 9.804.783.107,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 44,42% dengan predikat kinerja sangat rendah. Rendahnya penyerapan anggaran BLUD Puskesmas se Kota Dumai karena ada kendala terkait penyaluran dana BOK puskesmas yang baru tersalurkan pada akhir bulan Maret 2024 ke rekening puskesmas.

Pencapaian realisasi keuangan berdasarkan program Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menunjukkan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dengan realisasi keuangan tertinggi yakni sebesar 40,35% disusul dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 31,69%. Sementara program dengan realisasi keuangan terendah adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yakni sebesar 16,05% seperti terlihat pada tabel 2.1 di bawah.

Tabel 2.1
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program
Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu Anggaran	Realisasi sd Triwulan II	% Realisasi
	Semua Bidang			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	157.185.580.910	63.431.019.392	40,35
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.618.590.032	19.667.483.602,14	30,44
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.824.986.000	2.796.288.120	31,69
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	978.517.100	233.046.000	23,82
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	560.503.025	89.960.773	16,05
	Jumlah	232.168.177.067	86.217.797.887,14	37,14

Pencapaian realisasi keuangan berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2024, menunjukkan BLUD Puskesmas Dumai Barat merupakan unit kerja dengan realisasi keuangan tertinggi yakni sebesar 57,74%, sementara unit kerja dengan realisasi keuangan terendah adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai yakni sebesar 36,37% seperti terlihat pada tabel 2.2 di bawah.

Tabel 2.2
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi sd Triwulan II	% Realisasi
1	Dinas Kesehatan Kota Dumai	210.094.980.957	76.413.014.780,14	36,37
2	BLUD Puskesmas Dumai Kota	2,752,707,500	1,051,152,210	38.19
3	BLUD Puskesmas Dumai Barat	1,876,692,000	1,083,577,781	57.74
4	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	2,031,361,000	921,300,244	45.35
5	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	3,276,335,960	1,733,074,149	52.90
6	BLUD Puskesmas Medang Kampai	1,467,582,000	722,316,695	49.22
7	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1,856,715,000	826,763,235	44.53
8	BLUD Puskesmas Bukit Timah	1,140,749,000	485,020,726	42.52
9	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	3,570,229,000	1,305,269,783	36.56
10	BLUD Puskesmas Purnama	1,641,111,000	717,964,318	43.75
11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	2,271,073,650	883,057,669	38.88
12	BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	188,640,000	75,286,297	39.91
	Jumlah	232.168.177.067	86.217.797.887,14	37,14

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Dumai

2.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2023, pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan adalah sebesar 0.778. Bila dibandingkan dengan target Indeks Kesehatan pada tahun 2023 yakni sebesar 0.789-0.790, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 98.61% yang berarti pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan pada tahun 2022 yakni sebesar 0.771, maka terlihat ada peningkatan pencapaian Indeks Kesehatan sebesar 0.007 point pada tahun 2023. Bila dibandingkan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan pada tahun 2022 yakni sebesar 98.22%, maka terlihat ada peningkatan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan sebesar 0.39 point pada tahun 2023 (98.61%).

Pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), terlihat pencapaian AHH Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 71,67 tahun. Bila dibandingkan dengan target AHH Kota Dumai pada tahun 2023 yakni sebesar 71,29-71.33 tahun, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan AHH pada tahun 2022 yakni sebesar 71.25, maka terlihat ada peningkatan pencapaian AHH Kota Dumai sebesar 0.42 point pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan persentase capaian AHH pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka terlihat persentase capaian kinerja AHH pada tahun 2023 (100%) statis.

Sedangkan untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terlihat pencapaian Cakupan JKN pada tahun 2023 sebesar 100.02%. Bila dibandingkan dengan target Cakupan JKN pada tahun 2023 yakni sebesar 97%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan Cakupan JKN pada tahun 2022 yakni sebesar 95.80%, maka terlihat ada peningkatan pencapaian Cakupan JKN sebesar

4.22 point pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan persentase capaian Cakupan JKN pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka terlihat persentase capaian kinerja Cakupan JKN pada tahun 2023 (100%) statis.

Tabel 2.3
Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kota Dumai 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Jumlah Sasaran	Tingkat Realisasi dan Persentase Pencapaian Indikator Kinerja								
					2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	Pencapaian	Target	Realisasi	Pencapaian	Target	Realisasi	Pencapaian
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan			0.79	0.77	97.47	0.785	0.771	98.22	0.789-0.790	0.778	98.61
		1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup		71.04	70.98	99.92	71.10	71.25	100.00	71.29-71.33	71.67	100.00
		2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Dumai		92	87.55	95.16	92.2	95.8	100.00	97	100.02	100.00

2.2.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran IKU menggunakan Perubahan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 2.4
Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja	Kategori Nilai
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	99.45	99.45	Sangat Tinggi
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17	11.36	100	Sangat Tinggi
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24	13.42	100	Sangat Tinggi
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101	103.23	97.79	Sangat Tinggi
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,29-71.33	71.67	100	Sangat Tinggi
		2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	30.44	30.44	Sangat Rendah
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.8	0.01	100	Sangat Tinggi
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72	81.82	Tinggi
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0.18	100	Sangat Tinggi
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	198.03	-160.06	Sangat Rendah
		3 Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0.07	100	Sangat Tinggi
		3.2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	1.10	100	Sangat Tinggi
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97	100.02

Berdasarkan data di atas, secara umum Dinas kesehatan cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 ini. Dari 11 Indikator

Kinerja Utama (IKU), ada sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaiannya sangat tinggi (8 IKU tercapai 100% dan 1 IKU tercapai 97.79%), dan sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaiannya tinggi. Namun, masih ada sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaiannya sangat rendah yakni Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya sangat rendah tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai mengingat dampak pasca pandemik COVID 19 mobilitas penduduk kembali tinggi. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID 19 di Indonesia, maka penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan status bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional secara resmi dicabut. Disamping itu, potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, sebagai daerah transit baik dalam negeri maupun luar negeri, tingginya kepadatan penduduk di daerah perkotaan. Kondisi tersebut berpengaruh pada penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berdampak pada tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tersebut.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Dumai cukup berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 74.50% dengan kategori nilai sedang dan atribut capaian indikator kinerja berhasil. Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan tahun 2022 yakni sebesar 94.92% (kategori nilai sangat tinggi dan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil), maka terlihat ada penurunan pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan tahun 2023.

Pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai dari tahun 2020 s.d 2023 dan proyeksi tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan dari tahun 2020 s.d 2023 dan proyeksi tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Angka Kematian Bayi	IKU	IKK	SDG's	19 per	18 per	17.5 per	17 per	7.35 per	8.26 per	9.96 per	11.36 per	8 per 1.000	8 per 1.000
				Renstra Kes	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH
2	Angka Kematian Balita	IKU	IKK	SDG's	26 per	25 per	24.5 per	24 per	8.81 per	9.82 per	11.13 per	13.42 per	11 per 1.000 KH	10 per 1.000 KH
				Renstra Kes	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH	1.000 KH
3	Angka Kematian Ibu	IKU	IKK	SDG's	102 per	102 per	101.5 per	101 per	36.73 per	263.41 per	58.56 per	103.23 per	100.5 per	100 per
				Renstra Kes	100.000 KH	100.000 KH	100.000 KH	100.000 KH	100.000 KH	100.000 KH	100.000 KH	100.000 KH	100.000 KH	100.000 KH
4	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Umur)	IKU	-	RPJMD	71.04 tahun	71.04 tahun	71.10 tahun	71.71.29-	70.93 tahun	70.98 tahun	71.25 tahun	71.67 tahun	71.34-71.37	71.38-71.42
				Renstra Kes				71.33 tahun						tahun
5	Angka Kesakitan Malaria	IKU	IKK	SDG's	1 per 1.000 penduduk	1 per 1.000 penduduk	0.9 per 1.000 penduduk	0.8 per 1.000 penduduk	0.01 per 1.000 penduduk	0.003 per 1.000 penduduk	0.02 per 1.000 penduduk	0.01 per 1.000 penduduk	0.1 per 1.000 penduduk	0.1 per 1.000 penduduk
				Renstra Kes										
6	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	IKU	IKK	Renstra Kes	88%	88%	88%	88%	66.57%	9.35%	41.42%	72.00%	88%	88%
7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	IKU	-	Renstra Kes	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2.03%	0.17%	0.16%	0.18%	< 1%	< 1%
8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	IKU	IKK	SDG's	2 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	114.27 per 100.000 penduduk	15.56 per 100.000 penduduk	56.64 per 100.000 penduduk	198.03 per 100.000 penduduk	54 per 100.000 penduduk	54 per 100.000 penduduk
				Renstra Kes										
9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	IKU	-	Renstra Kes	2%	1%	1%	1%	0.01%	0.03%	0.12%	0.07%	1%	1%
10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	IKU	IKK	SDG's	5%	3%	3%	3%	0.41%	0.38%	0.69%	1.10%	2%	2%
11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	IKU	-	RPJMD	90%	92%	92.2%	97.0%	85.52%	87.55%	95.80%	100.02%	100%	100%
				Renstra Kes										

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

1.1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)

Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 99 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11.36 per 1.000 kelahiran hidup. Target indikator angka kematian bayi tahun 2023 yakni 17 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaiannya 100% yang berarti pencapaian indikator angka kematian bayi sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

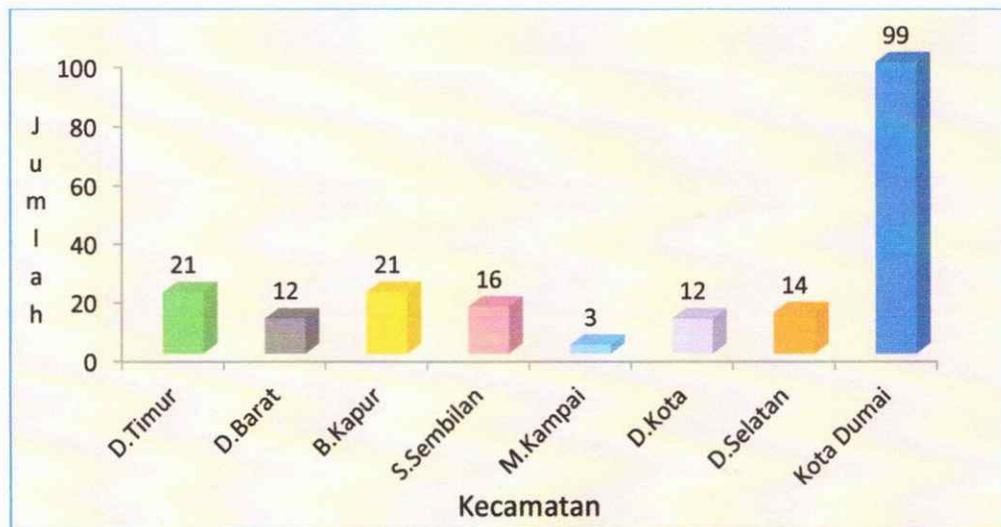
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian bayi sebesar 9.96 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 17 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target. Demikian juga bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 17.6 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target Target Nasional. Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 2.1 berikut ini :

Grafik 2.1
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur masing-masing sebanyak 21 kasus (21.21%), disusul dengan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 16 kasus (16.16%), seperti terlihat pada grafik 2.2 berikut ini :

Grafik 2.2
Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2023



Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia

Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 117 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 13.42 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator angka kematian balita sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian balita sebesar 11.13 per 1000 kelahiran hidup, maka angka tersebut mengalami peningkatan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 24 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target. Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 2.3 berikut ini :

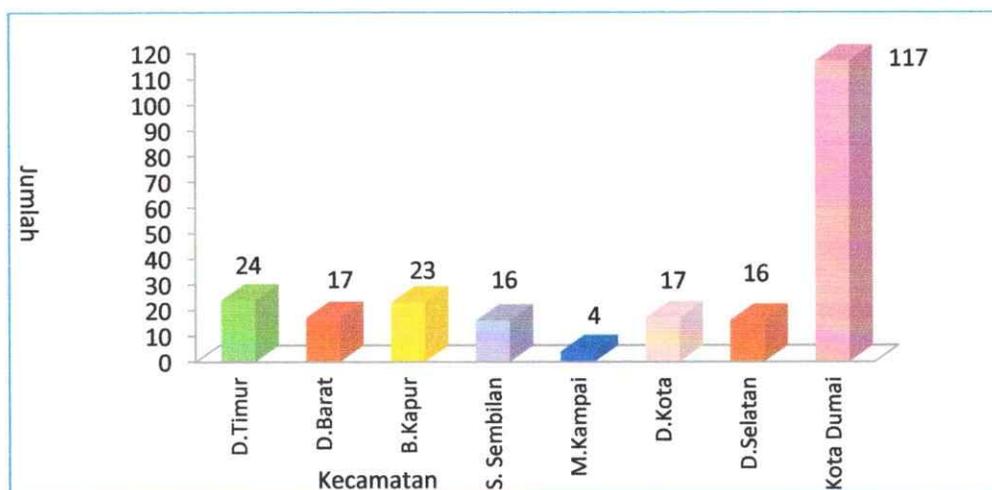
Grafik 2.3
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 24 kasus (20.51%), Kecamatan Bukit kapur sebanyak 23 kasus (19.66%), disusul Kecamatan Dumai Barat Dan

Kecamatan Dumai Kota masing-masing sebanyak 17 kasus (14.53%) seperti terlihat pada grafik 2.4 berikut ini :

Grafik 2.4
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2023



Penyebab kematian balita masih didominasi oleh BBLR dan Asfiksia.

Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 9 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 103.23 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 97.79% yang berarti pencapaian indikator angka kematian ibu sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, di mana angka kematian ibu sebesar 58.56 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat adanya peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 101 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini telah melebihi target (yang berarti tingkat pencapaiannya tidak baik). Namun bila dibandingkan dengan target

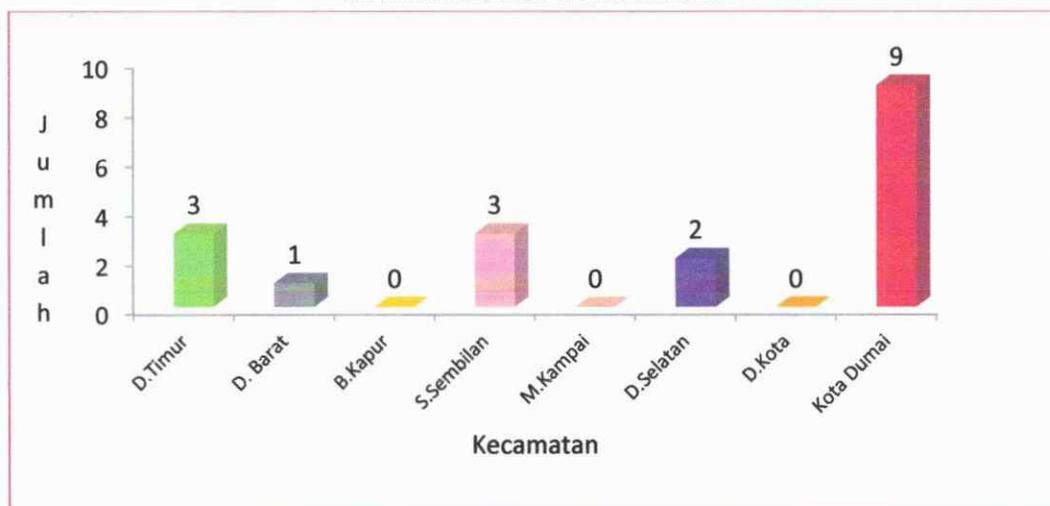
Nasional sebesar 194 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu di Kota Dumai masih di bawah Target Nasional. Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat grafik 2.5 berikut ini :

Grafik 2.5
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



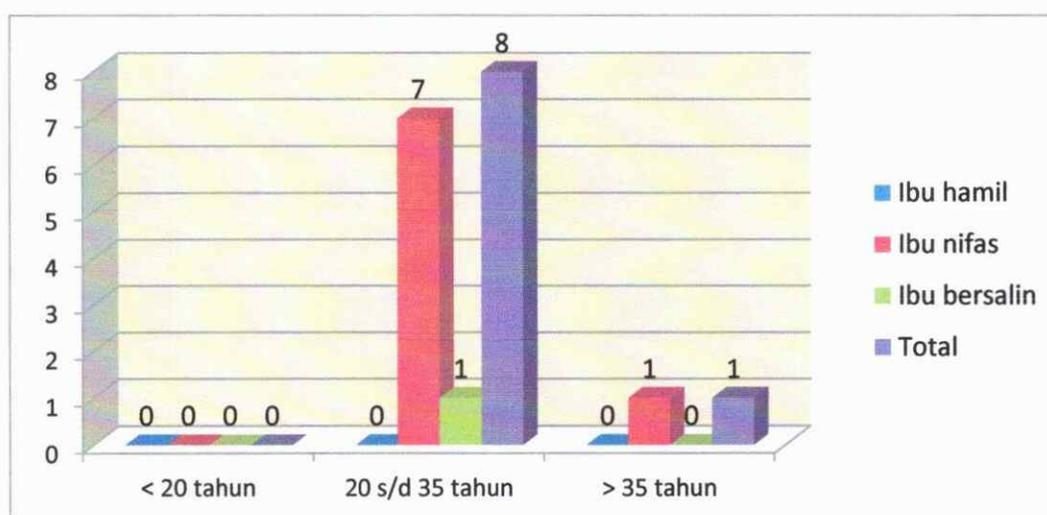
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 3 kasus (33.33%), disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 2 kasus (22.22%) seperti terlihat pada grafik 2.6 berikut ini :

Grafik 2.6
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2023



Penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan sebanyak 4 kasus, gangguan hipertensi sebanyak 3 kasus dan lainnya sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 8 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, mayoritas kasus kematian ibu seluruhnya terjadi pada kelompok ibu nifas sebanyak 8 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.7
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023



Berdasarkan tempat meninggal, sebanyak 7 kasus atau sebesar 77.78% kematian ibu merupakan kasus rujukan yang meninggal di RSUD Kota Dumai, dan sisanya sebanyak 2 kasus (22.22%) meninggal di rumah pasien. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelayanan ibu bersalin dan ibu nifas di Kota Dumai.

Umur Harapan Hidup

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup untuk Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 71,67 tahun. Target kinerja Umur Harapan Hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 71.29-71,33 tahun, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator Umur Harapan Hidup sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada grafik 2.8 berikut ini :

Grafik 2.8
Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Tabel 2.6
Umur Harapan Hidup (UHH)
di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2020	71,47	71,60	70,93
2.	2021	71.57	71.67	70.98
3.	2022	71.85	71.95	71.25
4.	2023	73.93	72.24	71.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan pencapaian Umur Harapan Hidup Provinsi Riau pada tahun 2023 yakni sebesar 71,24 dan pencapaian Umur Harapan Hidup Indonesia pada tahun 2023 yakni sebesar 73.93, terlihat capaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai masih di bawah angka Provinsi Riau dan angka Nasional.

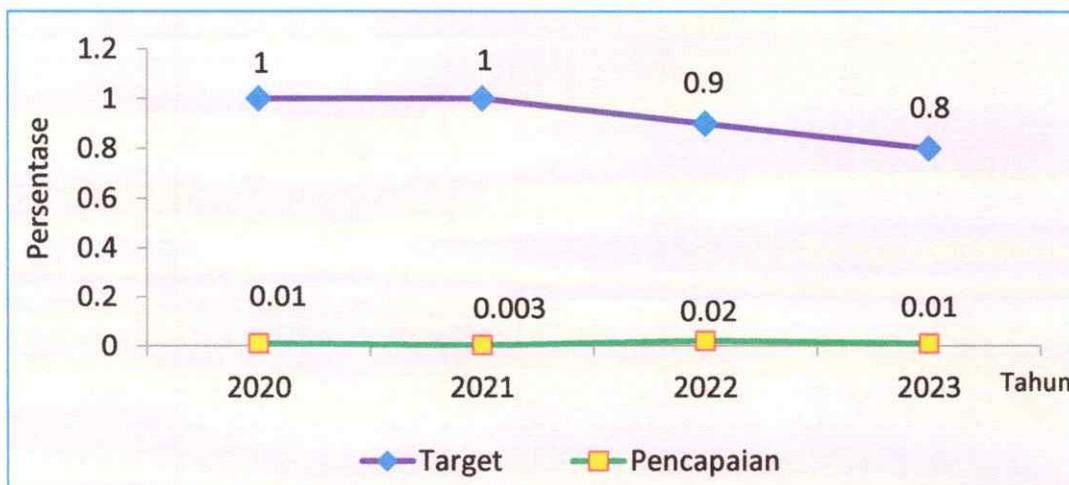
1.2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 155 kasus malaria klinis. Dari 155 kasus yang ada terdapat 5 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0.01 per 1.000 penduduk. Target kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (*Annual Parasite Incidence*) Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 0.8 per 1.000 penduduk, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator Angka Kesakitan Malaria (API) sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

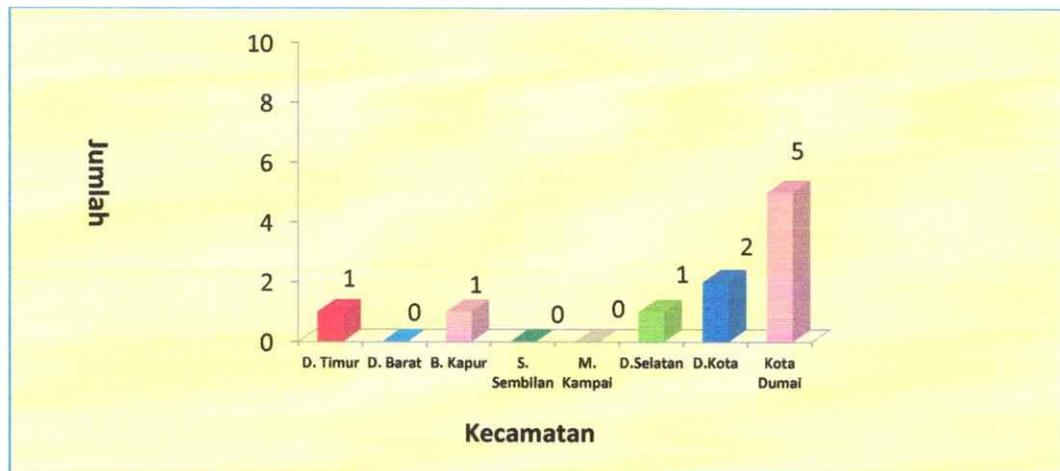
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0.02 per 1.000 penduduk, terlihat ada sedikit penurunan angka *Annual Parasite Incidence* (API) pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 0.8 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung menurun seperti terlihat pada grafik 2.9 dibawah ini :

Grafik 2.9
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif ditemukan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Kota sebanyak 2 kasus, Kecamatan Dumai Timur sebanyak 1 kasus (kasus import), Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 1 kasus, dan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 1 kasus seperti terlihat pada grafik 2.10 berikut ini:

Grafik 2.10
Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023

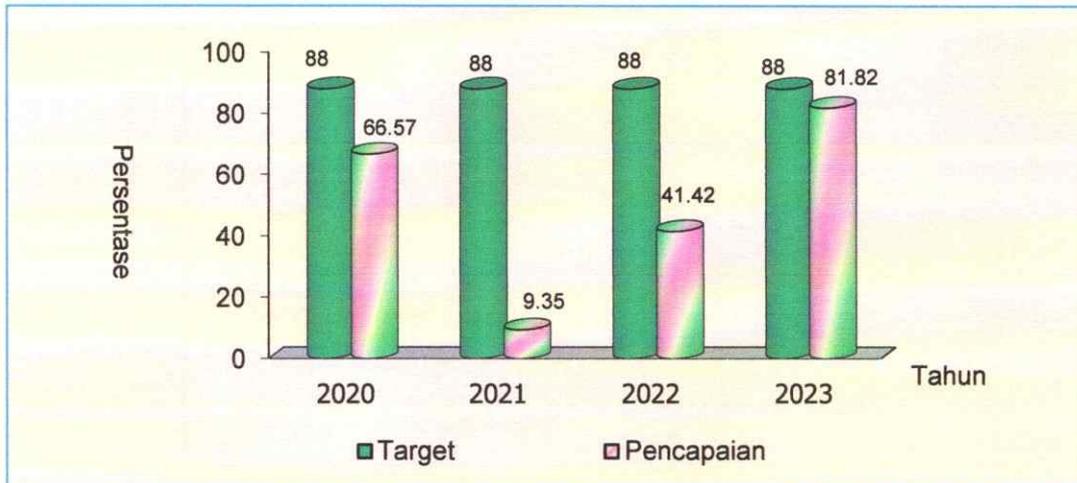


Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2023 dari total 450 penderita TB Paru BTA+ yang ditemukan (12-15 bulan yang lalu) dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, hasil evaluasi pengobatan menunjukkan sebanyak 324 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ adalah sebesar 72%. Target kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 88%, sehingga persentase pencapaian kinerjanya sebesar 81.82%, yang berarti pencapaian indikator Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja berhasil.

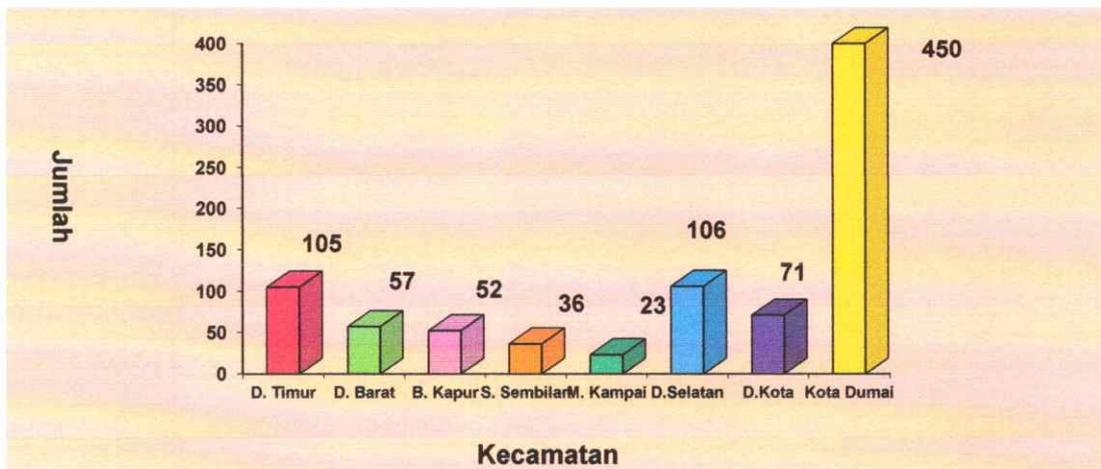
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 sebesar 41.42%, maka terlihat ada peningkatan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ tahun 2023 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.11 berikut ini :

Grafik 2.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus TB Paru BTA+ banyak terjadi di Kecamatan Dumai Selatan (106 kasus) disusul dengan Kecamatan Dumai Timur (105 kasus) dan Kecamatan Dumai Kota (58 kasus), seperti terlihat pada grafik 2.12 berikut ini :

Grafik 2.12
Jumlah Kasus TB Paru BTA+ Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Tingginya kasus TB Paru BTA+ di 3 (tiga) kecamatan tersebut disebabkan ke tiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan padat penduduk yang memudahkan penularan penyakit TB Paru BTA+.

Dari sebanyak 126 pasien TB Paru BTA+ yang dinyatakan belum sembuh, sebanyak 90 orang atau sebesar 71.43% tetap melakukan pengobatan

hingga akhir pengobatan dengan status pengobatan lengkap, sebanyak 0 orang dinyatakan gagal, sebanyak 22 orang atau sebesar 17.46% meninggal dunia, sebanyak 10 orang atau sebesar 7.94% Lost Follow Up (LFU) dan sebanyak 4 orang atau sebesar sebesar 3.17% pindah domisili.

Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 595 kasus yang terdiri dari 547 kasus lama dan 48 kasus baru yang ditemukan tahun 2023. Dari 595 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 121 kasus, Lost Follow Up (LFU) sebanyak 98 kasus (hilang kontak) dan sebanyak 8 kasus berhenti minum obat ARV, sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 368 orang terdiri penderita HIV Laki-laki sebanyak 191 orang (51.90%) dan penderita HIV Perempuan sebanyak 177 orang (48.10%). Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko (sasaran kelompok usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 209.297 orang) pada tahun 2023 adalah sebesar 0.18%. Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0.16%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar <1%, maka pencapaian tersebut masih dibawah target.

Pencapaian Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai berfluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.13 berikut ini :

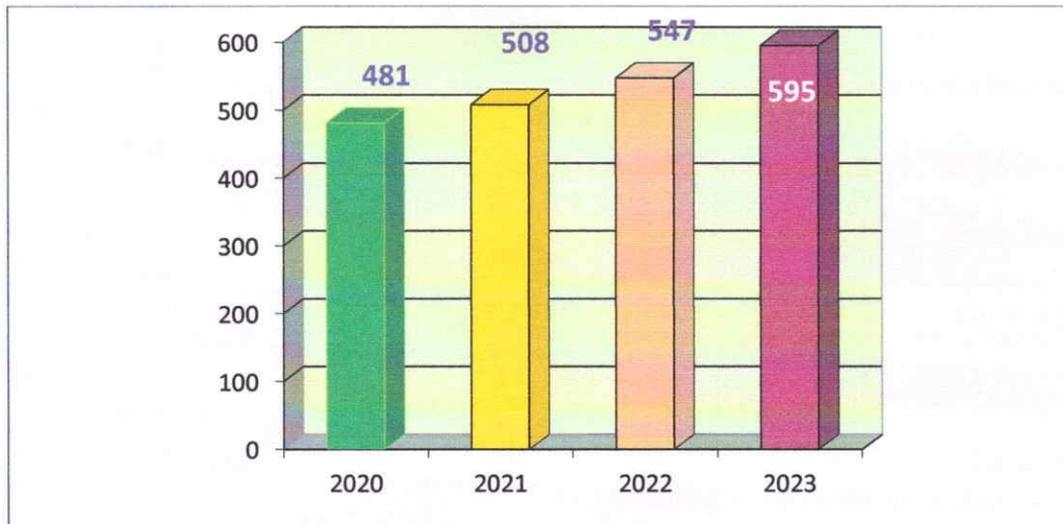
Grafik 2.13
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai. Meskipun pencapaian angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko Kota Dumai rendah, hal tersebut perlu tetap diwaspadai karena kasus HIV merupakan fenomena gunung es.

Pada tahun 2023 pencapaian angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di Kota Dumai sebesar 0.14 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di Kota Dumai sebesar 0.10 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka terlihat ada peningkatan angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar 0.13 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka pencapaian tersebut telah melebihi target.

Grafik 2.14
Data Kumulatif Kasus HIV Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023



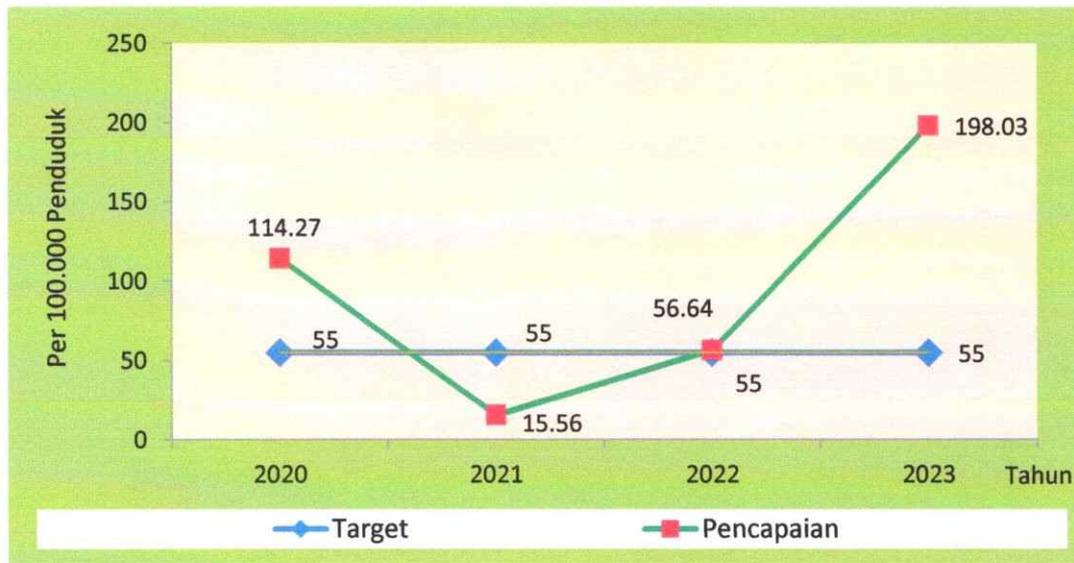
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2023 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 664 kasus atau Incidence Rate (IR) = 198.03 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 9 orang atau CFR = 1.37%. Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 55 per 100.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar -160.06%, yang berarti pencapaian indikator Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) sangat rendah dengan atribut capaian indikator kinerja tidak berhasil.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 186 kasus atau IR = 56.64 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 0 orang atau CFR = 0 %, maka ada peningkatan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue yang signifikan pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar 55 per 100.000 penduduk, maka pencapaian tersebut telah melebihi target.

Pencapaian angka kesakitan DBD Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.15 berikut ini

Grafik 2.15
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023

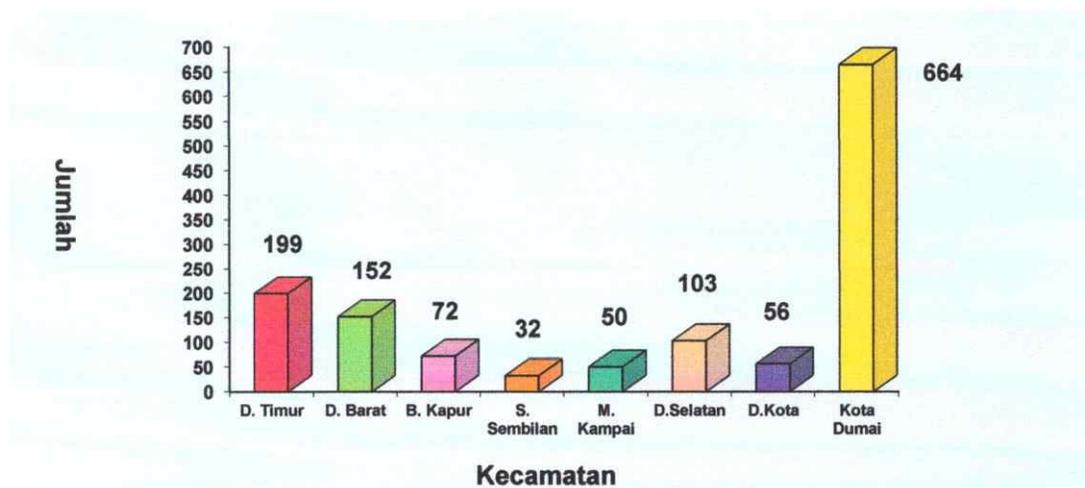


Tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti $\pm 80\%$ penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 199 kasus (29.97%), disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 152 kasus (22.89%) dan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 103 kasus (15.51%), seperti terlihat pada grafik 2.16 berikut ini

:

Grafik 2.16
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 250 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/ pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

1.3 Meningkatnya Status Gizi Balita

Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

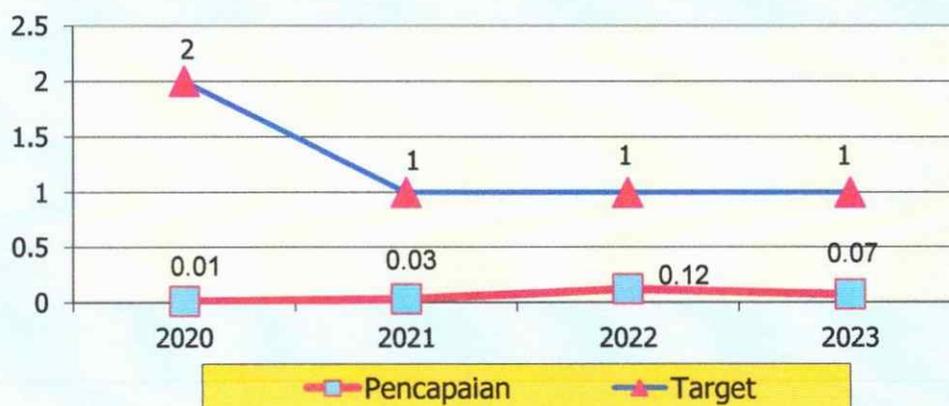
Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh

status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Pada tahun 2023 ditemukan kasus balita dengan gizi buruk sebanyak 13 kasus dari 19.267 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah sebesar 0,07%. Target kinerja persentase balita dengan gizi buruk Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator persentase balita dengan gizi buruk sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

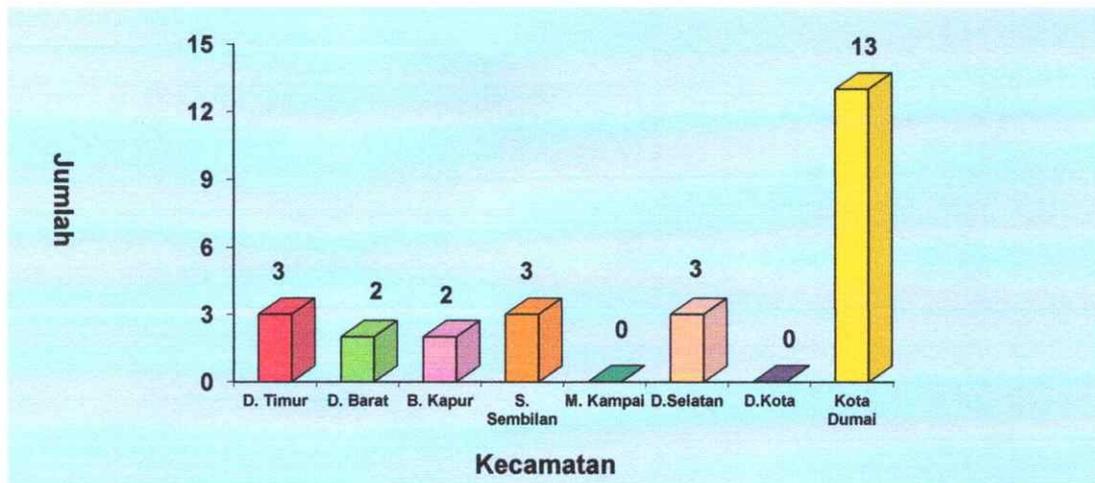
Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 23 kasus dengan persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0.12%, maka ada penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Pencapaian persentase balita dengan gizi buruk Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi buruk mengalami fluktuasi seperti terlihat pada grafik 2.17 berikut ini

Grafik 2.17
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita dengan gizi buruk terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 3 kasus, seperti terlihat pada grafik 2.18 berikut ini :

Grafik 2.18
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Terhadap 13 kasus gizi buruk tersebut telah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu bubuk formula 100 kkal/100 ml atau 150 gram per hari dan biskuit) selama 90 hari, pemberian larutan F100 dan pemantauan setiap minggunya oleh Tim Pemantau Gizi (TPG) puskesmas dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling serta penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya. Dari 13 balita gizi buruk yang diintervensi sampai akhir tahun 2023, tinggal sebanyak 4 balita yang masih berstatus gizi buruk karena balita tersebut juga menderita penyakit penyerta. Agar status gizi balita tersebut dapat ditingkatkan menjadi gizi baik, maka penyakit penyertanya harus disembuhkan terlebih dahulu.

Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi

adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi kurang adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < 2 s/d -3 standar deviasi WHO-NCHS.

Pada tahun 2023 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang sebanyak 212 kasus dari 19.267 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 1.10%. Target kinerja persentase balita dengan gizi kurang Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 3%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator persentase balita dengan gizi kurang sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 133 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0.69%, terlihat ada peningkatan kasus balita dengan gizi kurang pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

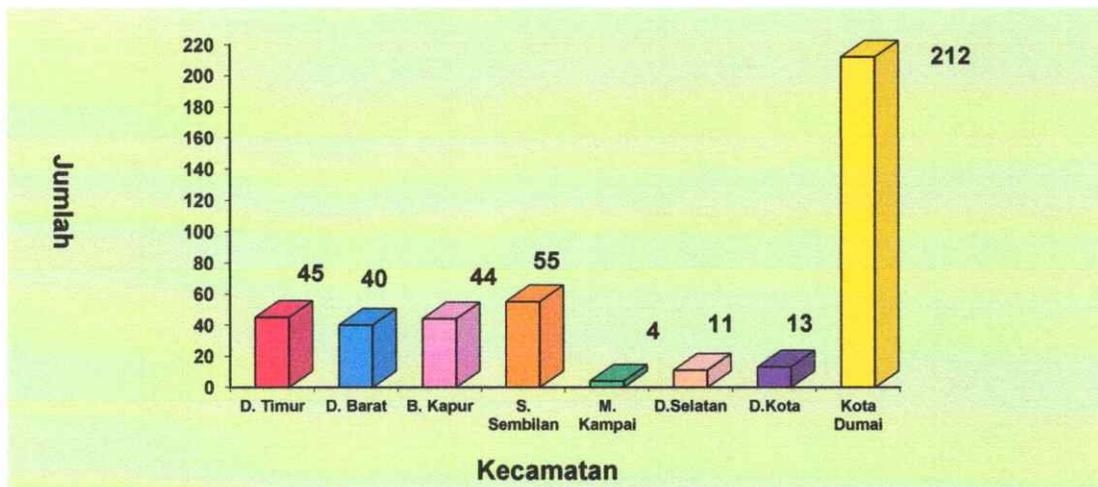
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.19 berikut ini:

Grafik 2.19
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita dengan gizi kurang terbanyak ditemukan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 55 kasus (25.94%) disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 45 kasus (21.23%), dan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 44 kasus (20.75%) seperti terlihat pada grafik 2.20 berikut ini :

Grafik 2.20
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Terhadap balita gizi kurang tersebut dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa pemberian makanan tambahan lokal dan pabrikan dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita. Dari 212 balita gizi kurang yang diintervensi sampai akhir tahun 2023, sebanyak 92 balita mengalami peningkatan status gizi menjadi gizi baik dan hanya 120 balita yang tetap dalam keadaan status gizi kurang.

Ada beberapa faktor penyebab kasus balita gizi kurang antara lain karena pola makan balita yang salah, ketidaktepatan pola asuh, faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi terhadap kemampuan membeli pangan keluarga, serta adanya penyakit penyerta yang diderita balita. Dengan demikian dalam upaya mencapai target penurunan persentase gizi kurang tersebut, perlu adanya penanganan intensif terhadap permasalahan gizi kurang yang ada di Kota Dumai. Selain itu, untuk menekan agar potensi terjadinya kasus balita dengan gizi kurang tidak menjadi lebih besar tetap perlu diperlukan upaya-upaya yang strategis. Upaya yang sudah dilaksanakan adalah dengan

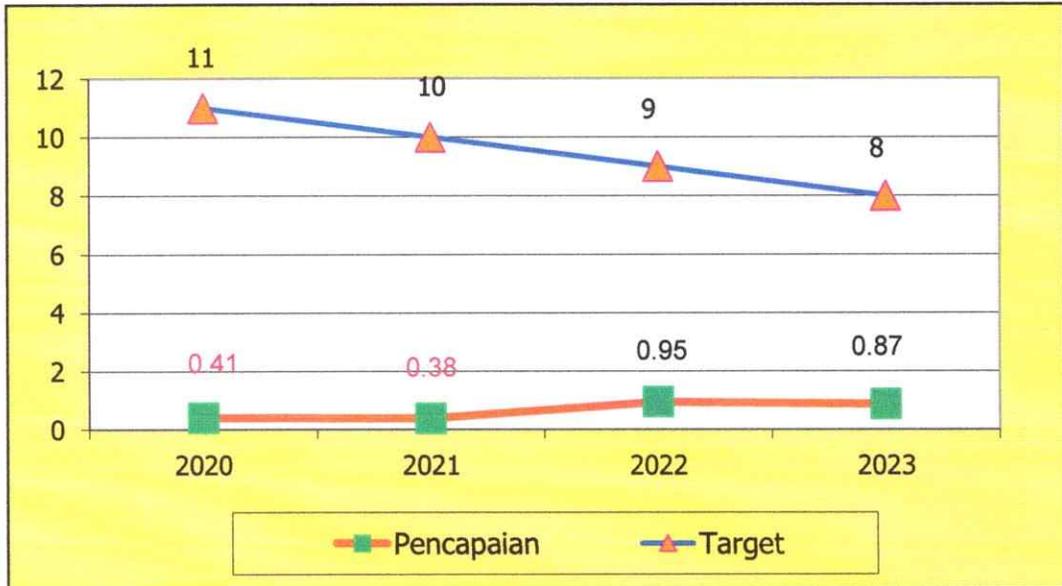
pemberian makanan tambahan, konseling dan pengobatan di puskesmas, serta perawatan di Kota Dumai.

Perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satu kondisi gizi kurang yang menjadi issue strategis baik Global, Nasional maupun Provinsi adalah balita pendek atau stunting. Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi tubuhnya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020), stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

Berdasarkan data e-PPGBM per Desember Tahun 2023 diperoleh status gizi balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kota Dumai sebanyak 168 orang dari 19.267 balita yang ditimbang (prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 0.87%). Bila dibandingkan dengan data e-PPGBM tahun 2022 dimana status gizi balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kota Dumai sebanyak 185 orang dari 19.381 balita yang ditimbang (prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 0.95%), maka terlihat ada penurunan kasus stunting pada Tahun 2023. Adanya penurunan jumlah kasus stunting pada tahun 2023 karena ada balita stunting yang mengalami peningkatan panjang badan/tinggi badan dan ada balita yang sudah tidak berada pada umur 0-60 bulan. Target kinerja prevalensi stunting pada balita Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 8%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator prevalensi stunting pada balita sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

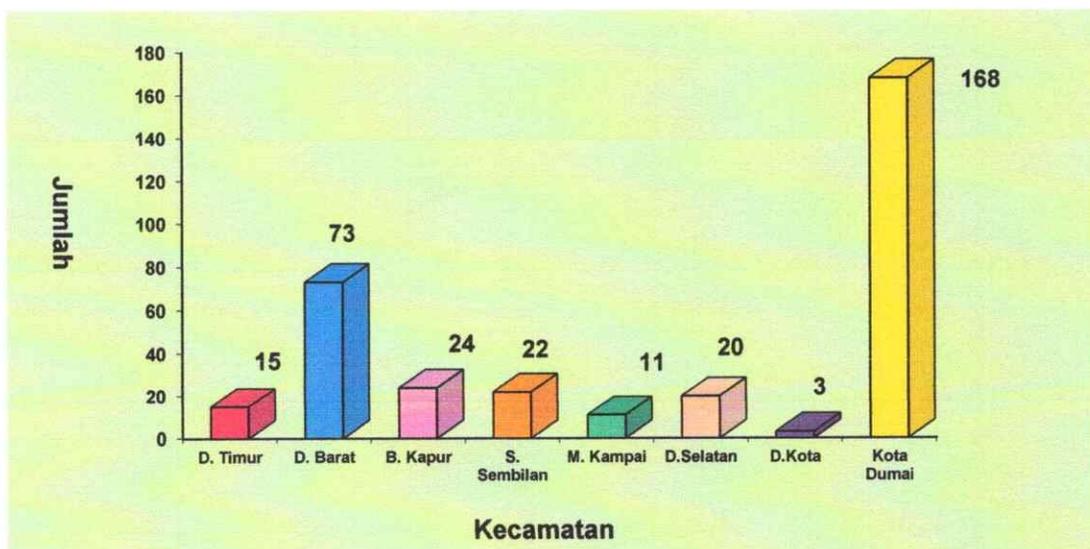
Pencapaian prevalensi stunting pada balita Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.21 berikut ini:

Grafik 2.21
Pencapaian Prevalensi Stunting Pada Balita
Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita stunting banyak ditemukan di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 73 kasus (43.45%) disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 24 kasus (14.29%), dan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 22 kasus (13.10%) seperti terlihat pada grafik 2.22 berikut ini:

Grafik 2.22
Jumlah Kasus Balita Stunting Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023



Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

2.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai.

Selain merupakan salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai, indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional juga merupakan salah satu indikator “Sustainable Development Goal’s” (SDG’s). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peserta JKN terdiri dari:

- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 213.513 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 124.618 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 338.131 dari 338.064 orang penduduk Kota Dumai berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) semester I Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 100.02%. Target kinerja persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 97%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kota Dumai sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Grafik 2.23 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



Tabel 2.7
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk
Menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai Tahun 2020 – 2023

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan			
		2020	2021	2022	2023
Penerima Bantuan Iuran (PBI)					
1	PBI APBN	74,766	75,857	85.175	103.498
2	PBI APBD	84,057	89,238	108.456	110.015
Sub Jumlah PBI		158.823	165.095	193.631	213.513
Non PBI					
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	82,728	86,623	94.250	97.128
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	26,429	26,350	26.479	22.846
3	Bukan Pekerja (BP)	702	3,188	3.159	4.644
Sub Jumlah Non PBI		109.859	116.161	123.888	124.618
Total Peserta Kota Dumai		268,682	281,256	317.519	338.131
Jumlah Penduduk Kota Dumai		314,166	321,238	331.445	338.064
% JKN di Kota Dumai		85,52	87,55	95,80	100,02
% JKN PBI		50,55	51,39	58,42	63,16

Berdasarkan jenis kepesertaan JKN, terlihat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 63.14% lebih banyak jumlahnya daripada Non PBI (36.86%). Hal ini menunjukkan beban Pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Dumai masih besar dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 317.519 orang atau sebesar 95.80%, maka jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 97%, maka angka tersebut telah mencapai target Kota Dumai. Pada tahun 2022, BPJS Indonesia telah menetapkan target bahwa kabupaten/kota dinyatakan mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95%. Dengan pencapaian UHC Kota Dumai tersebut, berarti Kota Dumai sudah mencapai UHC.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat dengan persyaratan peserta mau dirawat di kelas III terutama penduduk miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik sebagai peserta PBI APBN (KIS) sebanyak 103.498 orang atau sebesar 30.61% dan peserta PBI APBD sebanyak 110.015 orang atau sebesar 32.54%, sehingga total penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 213.513 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2023 yakni sebanyak 188.500 orang, maka telah terealisasi sebesar 113.27% yang artinya telah melebihi target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 193.631 orang, maka jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari pandemi COVID 19 dimana penduduk yang sebelumnya menjadi peserta BPJS secara mandiri (PBPU), karena kehilangan mata pencahariannya menjadi tidak mampu membayar iuran bulanan BPJS yang mengakibatkan banyak peserta BPJS PBPU menunggak. Dengan kebijakan Walikota Dumai yakni mengalihkan kepesertaan peserta BPJS dari PBPU menjadi PBI baik PBI APBN maupun PBI APBD, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan JKN PBI pada tahun 2023.

Sesuai metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Pembangunan Sosial (Bappenas, 2017) proporsi penduduk miskin dan tidak mampu dari total penduduk adalah sebesar 40% yang dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Sejak tahun 2017 pencapaian persentase kepesertaan JKN PBI Kota Dumai sudah melebihi 40% dan angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 persentase kepesertaan JKN PBI Kota Dumai mencapai angka 63.16% yang artinya sudah melampaui target Nasional.

2.2.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Stándar Pelayanan Minimal dan Nomor 4 tahun 2019 tentang Stándar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Dinas Kesehatan Kota Dumai

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	SPM	IKK	SDG's Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	88.53%	90.48	90.59	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	92.57%	90.38	90.88	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	SPM	IKK	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	90.86%	92.74	93.87	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	SPM	IKK	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	41.82%	88.71	84.96	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	48.32%	86.65	75.16	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	56.38%	81.77	93.95	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	66.74%	85.94	93.68	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	18.03%	46.93	52.89	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	94.66	97.83	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	88.38%	97.57	100.00	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	59.56%	100.00	100.00	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang beseriko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	40.52%	79.35	100.00	100%	100%

Kinerja program kesehatan dituangkan dalam target – target SPM. Pencapaian target SPM bidang kesehatan merupakan kinerja Pemerintah Daerah. Pencapaian SPM bidang kesehatan Kota Dumai mulai tahun 2020 s/d 2023 sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

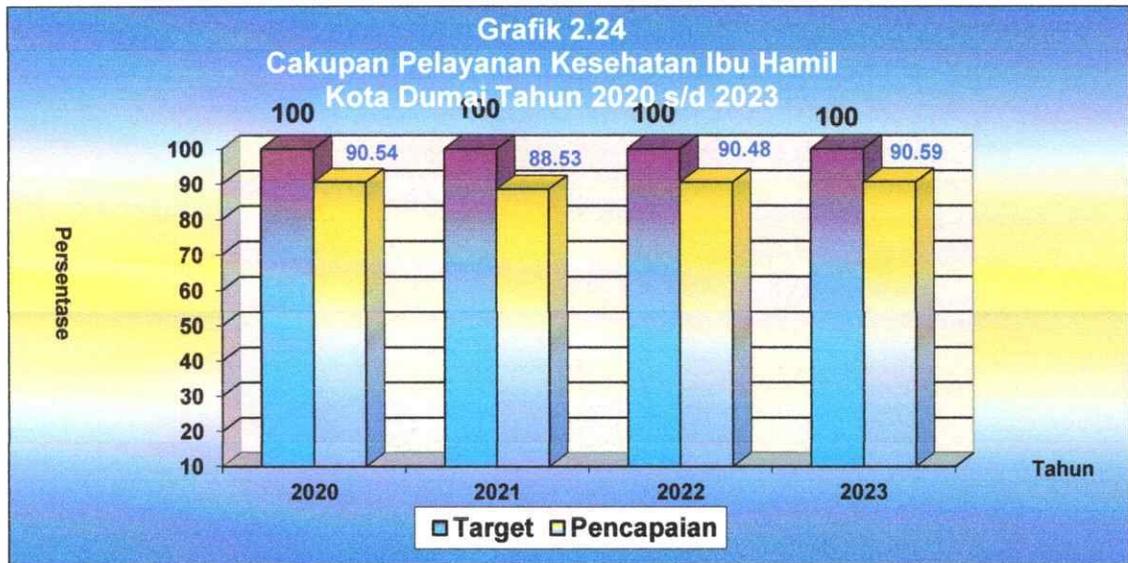
Pelayanan kesehatan pada ibu hamil meliputi pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Sedangkan tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil antara lain dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan perawat.

Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi "10 T" timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkaran lengan atas), tinggi fundus uteri (puncak rahim), menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus diphteri (Td) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta KB pasca persalinan.

Hasil pencapaian program pelayanan kesehatan ibu dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4 yang dihitung dengan membagi jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan (untuk penghitungan indikator K1) atau jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (untuk penghitungan indikator K4) dengan jumlah sasaran ibu hamil yang ada di wilayah kerja dalam 1 tahun.

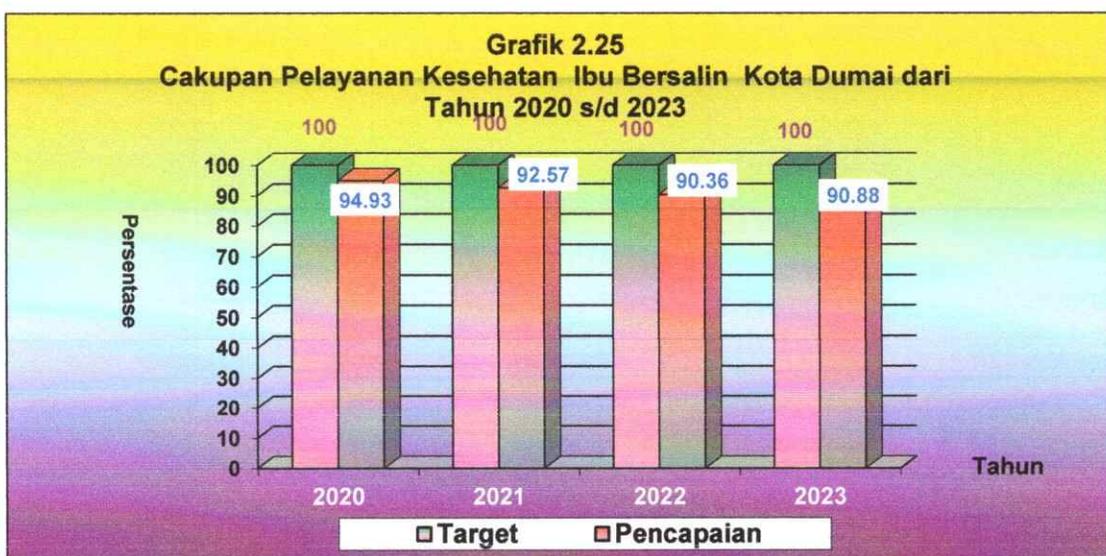
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2023 berfluktuas: cenderung meningkat namun belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2023 seperti

terlihat pada grafik berikut ini.



2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Standar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.



Dari grafik di atas terlihat perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2020 s.d 2022 cenderung mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2023 kembali meningkat tetapi belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ada ibu bersalin yang tidak mau ke fasilitas pelayanan kesehatan dan adanya mobilitas ibu bersalin karena faktor budaya dimana ibu melakukan persalinan di tempat orang tuanya berada (luar wilayah Kota Dumai) sehingga tidak tercatat di MPDN/e-kohort (tidak dilaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat, belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan kegiatan posyandu belum berjalan secara optimal dan masih ada orang tua yang tidak mau membawa bayinya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, adanya mobilitas ibu bersalin karena faktor budaya dimana ibu melakukan persalinan di tempat orang tuanya berada (luar wilayah Kota Dumai) sehingga pelayanan kesehatan bayi lahir tidak tercatat di e-kohort (tidak dilaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.26
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023

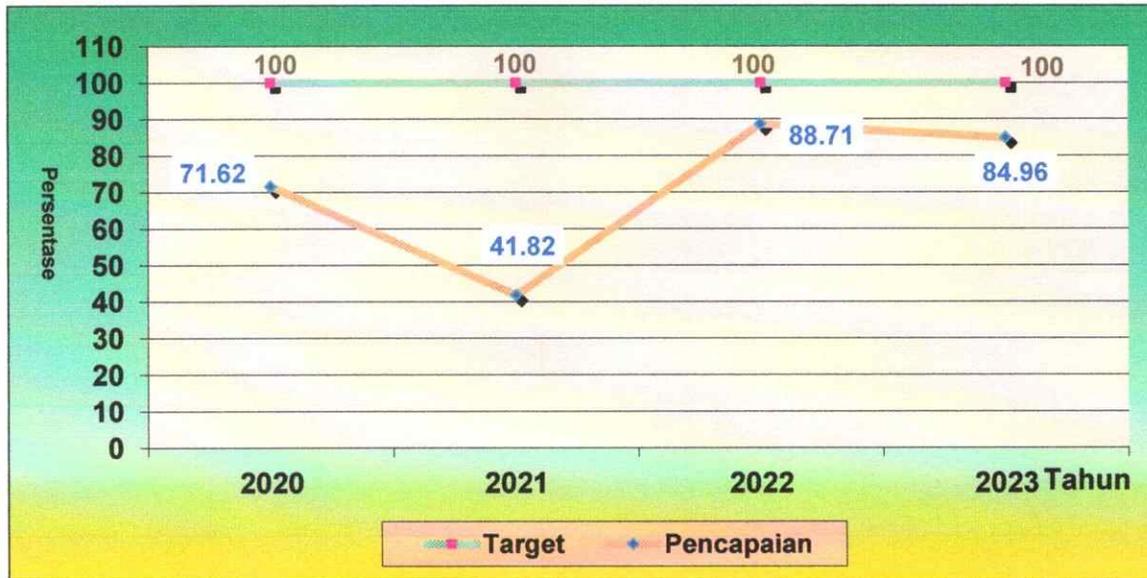


4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan balita di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi, belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu belum terlaksana secara optimal dan masih adanya orang tua yang tidak mau membawa balitanya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan balita di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.27
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023



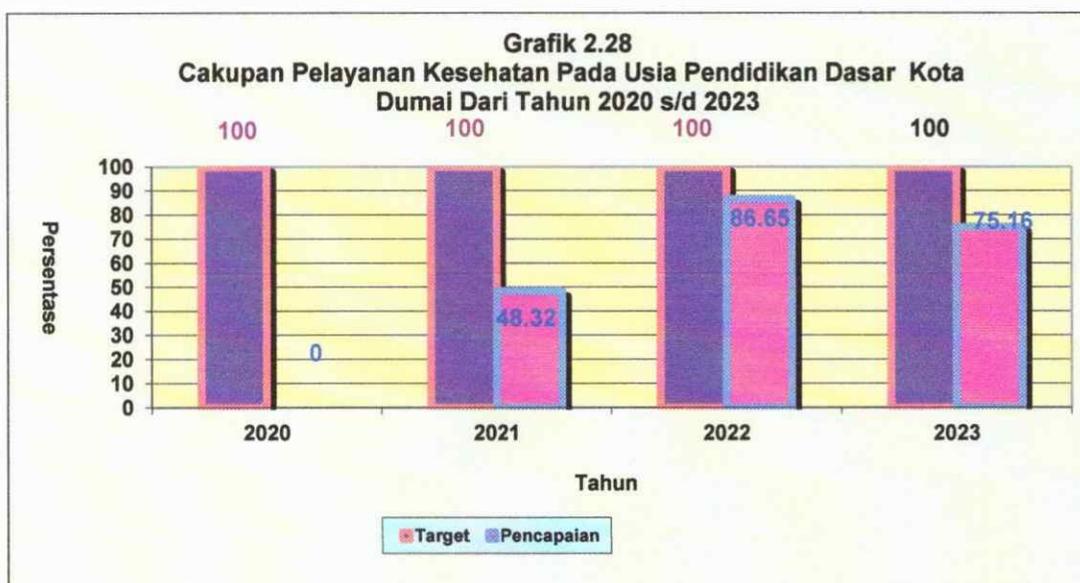
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skring kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di kota Dumai tahun 2020 – 2022 cenderung meningkat namun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Penjaringan anak sekolah untuk siswa baru sudah dilaksanakan oleh seluruh puskesmas, namun ada beberapa puskesmas yang tidak melakukan penjaringan berkala karena sibuk mempersiapkan akreditasi puskesmas. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

dasar di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warganegara usia 15 tahun – 59 tahun berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai estandar. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular, edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. Pelayanan edukasi pada usia produktif dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau UKBM.

Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, anamnesa perilaku beresiko. Wanita usia 30 – 50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual beresiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA test. Tindak lanjut skring meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan melakukan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat namun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif di posbindu belum terlaksana secara optimal dan masih adanya penduduk usia produktif yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan

kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.29
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

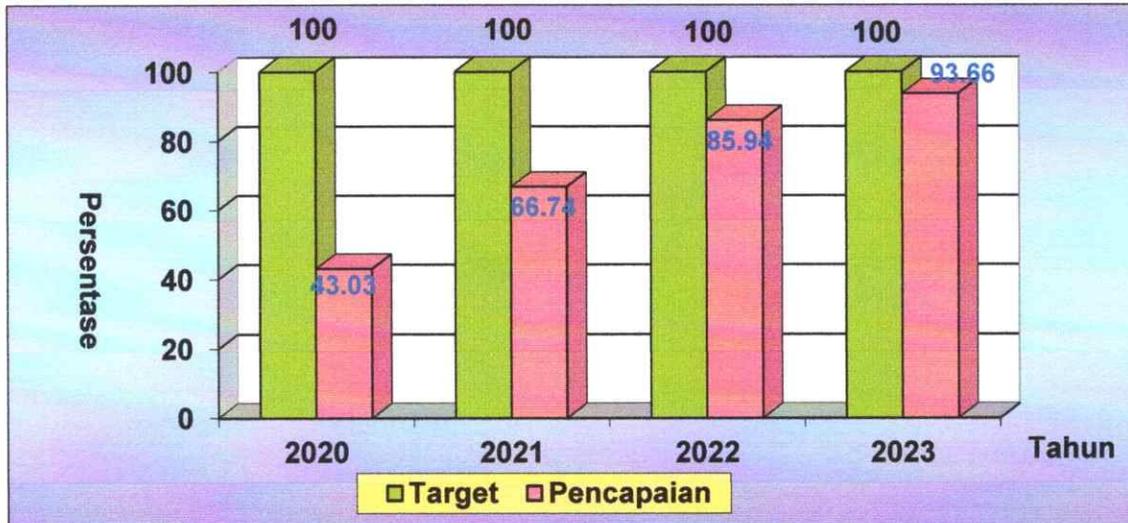
Pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun keatas. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi skrining usia lanjut.

Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan melakukan penyuluhan kesehatan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat namun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di posyandu lansia belum terlaksana secara optimal dan masih ada penduduk usia lanjut yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas

elayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.30
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

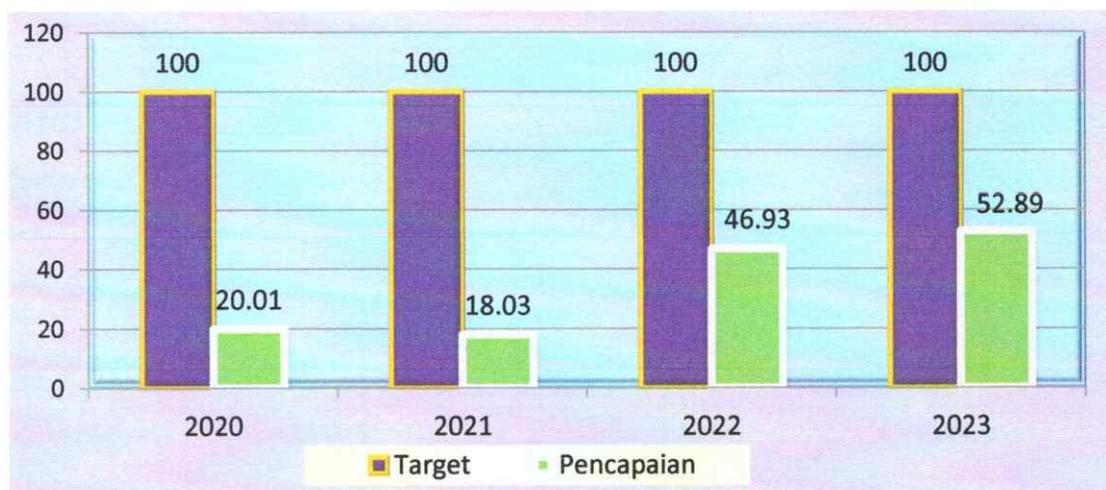
Selain penyakit menular yang masih merupakan masalah utama kesehatan di Kota Dumai, penyakit tidak menular seperti penyakit degeneratif menunjukkan kecenderungan meningkat dan juga menjadi permasalahan di Kota Dumai seperti penyakit Hipertensi. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi transisi epidemiologi yakni perubahan pola penyakit dan kematian yang ditandai dengan beralihnya penyebab penyakit dan kematian yang semula didominasi oleh penyakit infeksi/menular bergeser ke penyakit non infeksi/menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat.

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah yang dilakukan

minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan. Diagnosa Hipertensi ditegakkan jika Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg, pelayanan yang dilakukan dengan terapi farmakologi.

Perkembangan cakupan pelayanan penderita hipertensi di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat namun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan pelayanan kesehatan hipertensi di posbindu dan posyandu lansia belum terlaksana secara optimal. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan masih adanya penduduk yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.31
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



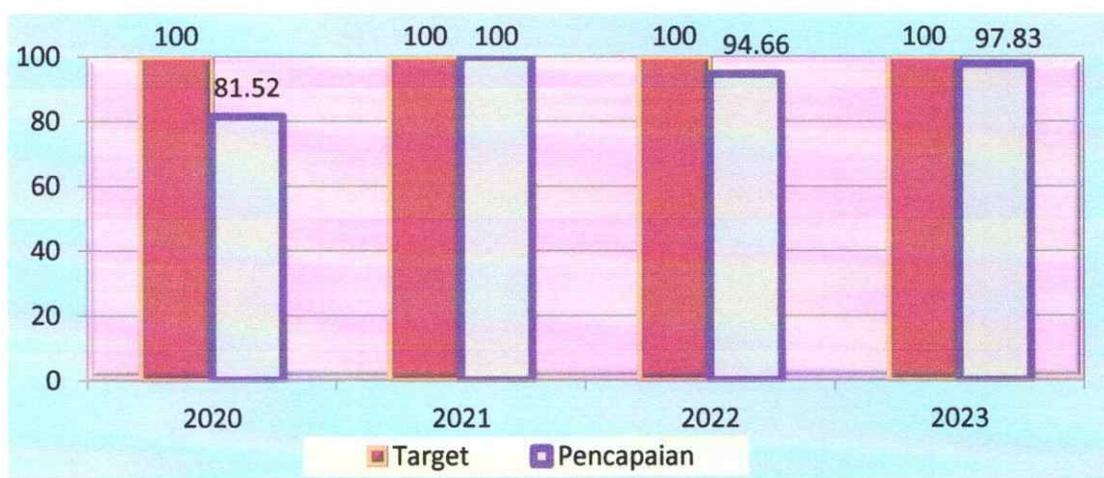
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai stándar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun . Pelayanan kesehatan sesuai stándar meliputi pengukuran gula darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan. Diagnosa DM ditegakkan jika Gula

Darah Sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl, pelayanan yang dilakukan dengan terapi farmakologi.

Perkembangan cakupan pelayanan penderita Diabetes Mellitus di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di posbindu dan posyandu lansia belum terlaksana secara optimal. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan masih adanya penduduk yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.32
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stándar oleh Pemerintah sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun . Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai stándar bagi psikotik akut dan skizoprenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa diantaranya pemeriksaan status mental, wawancara, edukasi kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat dan sudah mencapai 100% pada tahun 2023. Namun demikian masih

ada stigma di masyarakat, sehingga keluarga pasien malu atau enggan untuk membawa keluarganya dengan gangguan jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.33
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



10. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Untuk penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberkulosis, WHO telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stándar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat, bahkan

pada tahun 2022 dan 2023 pencapaiannya sudah mencapai 100%. Hal tersebut karena kondisi dan situasi di masyarakat mulai berangsur normal setelah adanya pandemi COVID 19, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Selain itu, petugas TB puskesmas sudah dapat melaksanakan kegiatan turun kontak serumah dan melakukan skrining massal dengan tetap mengatur jaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan. Lebih lanjut, puskesmas bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan LSM PKBI dalam melakukan penjarangan TB dan investigasi kontak dengan terjun langsung ke masyarakat di tempat-tempat yang beresiko tinggi dengan TB. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai stándar oleh pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV meliputi skrining dengan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun pada orang dengan risiko terinfeksi HIV pada ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, penaja seks, lelaki yang bergubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), warga binaan pemasyarakatan (WBP), pelayanan edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan .

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di kota Dumai tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat dan sudah mencapai 100% pada tahun 2023. Namun demikian masih berkembangnya stigma dan diskriminasi bagi penderita HIV merupakan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terinfeksi HIV di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Dumai tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan kesehatan yang perlu ditangani sebagai berikut:

1. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak belum optimal yang ditunjukkan dengan pencapaian Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Kematian Ibu yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Adanya tripple burden penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD.
5. Masih belum terkendalinya status gizi balita dimana jumlah kasus balita dengan gizi kurang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan masih ditemukannya kasus balita dengan gizi buruk dan kasus balita stunting.
6. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
7. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.

8. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Adapun permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kinerja dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Meskipun pencapaian kinerja Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita masih dibawah target Kota Dumai, namun kecendrungan kasus kematian bayi dan kematian balita menunjukkan peningkatan di Kota Dumai. Demikian juga kasus kematian ibu menunjukkan peningkatan bahkan telah melebihi target Kota Dumai. Kematian bayi dan kematian ibu sangat erat keterkaitannya. Sebagian besar kematian bayi diakibatkan kelainan pada kehamilan, lahir prematur dan berat badan lahir rendah, pada saat persalinan, maupun di minggu pertama kehidupan (akibat gangguan pernafasan, infeksi, kongenital, dan lainnya). Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal sebagai dampak pandemi COVID 19, dimana masih ada ibu-ibu yang tidak mau memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke praktek bidan karena takut tertular COVID 19. Isu "tiga terlambat" masih menjadi masalah utama layanan kesehatan maternal, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat mendapat pelayanan yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan.
2. Kota Dumai masih menjadi daerah rawan terjadinya penularan penyakit DBD dan Malaria, karena kota Dumai merupakan daerah dengan mobilisasi penduduk yang sangat tinggi dan daerah endemis DBD dan Malaria. Hal tersebut didukung oleh kondisi kesehatan lingkungan dan sosial budaya penduduk kota Dumai dimana \pm 80% penduduk Kota Dumai dalam memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan bak penampungan air yang potensial sebagai tempat berkembangbiaknya nyamuk vektor Demam Berdarah. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagi daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan Malaria dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.
3. HIV-AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang ditemukan saat ini hanya sebagian kecil, belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap HIV-AIDS di

masyarakat. Sejak tahun 2006 s/d 2018 Dinas Kesehatan secara kontinyu melakukan surveilans secara aktif melalui layanan VCT (*Voluntary Counseling Testing*)/konseling testing sukarela yang ada di 10 (sepuluh) Puskesmas di Kota Dumai, 1 KKP (Kantor kesehatan pelabuhan) dan RSUD Kota Dumai untuk melakukan penjangkauan dan pemeriksaan/tes HIV secara sukarela baik secara mobile maupun statis di masyarakat. Namun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 kegiatan tersebut sempat vakum karena tidak aktifnya lagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) akibat tidak adanya dukungan dana dari Global Fund. Pada tahun 2023 melalui dana Hibah, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mulai kembali aktif. Namun karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum optimal, bahkan ada kegiatan yang tetap dilaksanakan meskipun tidak ada anggaran. Selain itu petugas kesehatan dan KPA sering mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan (skrining) HIV pada hotspot tempat-tempat hiburan seperti karaoke, hotel/penginapan, panti pijat dan tempat hiburan malam lainnya.

4. Permasalahan penduduk pendatang atau illegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau illegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang. Pada umumnya permasalahan kesehatan yang ada banyak merupakan kontribusi dari penduduk pendatang (illegal) tersebut karena mereka jarang mengakses pelayanan kesehatan dasar karena status mereka yang illegal yang otomatis tidak mempunyai kartu identitas seperti KTP. Berdasarkan data dari puskesmas, selama tahun 2023 ada sebanyak 736 orang bukan penduduk Kota Dumai yang mengakses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas atau sebesar 0.25% dari total kunjungan rawat jalan puskesmas. Angka tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ada sebanyak 1.479 orang bukan penduduk Kota Dumai yang mengakses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Penduduk pendatang tersebut terbanyak berdomisili di Kecamatan Dumai Selatan (203 orang), Kecamatan Dumai Kota (140 orang), dan Kecamatan Dumai Timur (110 orang).

Rekomendasi atas permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Penyebab kematian bayi dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan kehamilan salah satunya dengan meningkatkan cakupan kunjungan enam kali pemeriksaan kehamilan (K6) di fasilitas kesehatan. Penyebab kematian ibu sebagian besar dapat dicegah (seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, komplikasi, dan infeksi) apabila cakupan pelayanan disertai mutu pelayanan yang baik. Disamping itu perlu penguatan edukasi ke masyarakat tentang deteksi ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam penanganan kasus ibu hamil dengan resiko tinggi dan komplikasi, peningkatan antenatal care berkualitas dan jaminan kesehatan bagi ibu yang bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta penguatan manajemen kesehatan ibu dan anak.
2. Permasalahan DBD baru bisa teratasi apabila tersedianya sarana dan prasarana sanitasi yang layak juga tersedianya sarana air bersih yang layak dan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh seluruh masyarakat. Permasalahan DBD tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan sendiri, tapi memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan OPD terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.
3. Permasalahan HIV/AIDS memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta (pengusaha karaoke, hotel/penginapan, panti pijat dan tempat hiburan malam lainnya). Sehingga perlu dukungan dari Pemerintah Kota Dumai berupa anggaran dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan skrining HIV/AIDS di tempat-tempat hiburan dan hotel/penginapan. Serta, dukungan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar petugas kesehatan dapat mengakses hotspot dimaksud.
4. Permasalahan penduduk pendatang atau illegal sejak lama belum ada solusinya sampai sekarang. Kolaborasi dan koordinasi antar Dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak kelurahan beserta Rt/Rw dalam mengawasi dan mengontrol penduduk pendatang atau penduduk tanpa KTP sangat diperlukan. Demikian juga dukungan dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan razia KTP secara kontinyu sangat diperlukan. Mungkin diperlukan

strategi baru untuk menjangkau penduduk Kota Dumai yang tidak memiliki KTP melalui pelayanan KTP mobile oleh dinas terkait.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 telah mempedomani dan selaras dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kota Dumai, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kesehatan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 didasarkan kepada Review Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Proses penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan anggaran dalam perencanaan kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan.

Pagu anggaran penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai mengacu pada pagu indikatif rancangan awal RKPD Kota Dumai tahun 2025 sesuai surat Walikota Dumai Nomor 050/09.1/Bappeda tanggal 05 Januari 2024 perihal Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yakni sebesar Rp 136.531.802.600,- terdiri dari pagu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 121.447.444.490,- dan pagu untuk BLUD 10 puskesmas dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 15.084.358.110,-. Namun, sesuai hasil pertemuan musrenbang Dinas Kesehatan Tahun 2024, total kebutuhan anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 sebesar Rp 156.643.348.164,- terdiri kebutuhan anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar

Rp 136.643.998.514,- dan kebutuhan anggaran untuk BLUD 10 puskesmas dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 19.999.349.650,-. Dengan demikian ada kekurangan anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 sebesar Rp 20.111.541.564,- terhadap alokasi pagu indikatif rancangan awal RKPD Kota Dumai tahun 2025 terdiri dari pagu Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp sebesar Rp 15.196.554.024,- dan pagu BLUD sebesar Rp 4.914.991.540,-.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan 28 Februari 2024 di Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung, maka salah satu hasil Forum Perangkat Daerah adalah permintaan penambahan anggaran pada Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 20.111.541.564,- untuk mengakomodir hasil usulan musrenbang kecamatan dan program prioritas kerja Walikota (termasuk program prioritas kerja Walikota yang belum terakomodir pada tahun-tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran) dan program prioritas Nasional/Provinsi.

Selain itu, ada penambahan anggaran sebesar Rp 49.247.859.698,- yang berasal dari pemindahan anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN RSUD Kota Dumai. Hal tersebut menindaklanjuti hasil konsultasi penginputan SIPD penatausahaan keuangan daerah ke Kementerian Dalam Negeri pada bulan Januari 2024 bahwa untuk belanja pegawai khususnya belanja gaji dan tunjangan ASN tidak boleh di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kan tetapi harus Pengguna Anggaran (PA). Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Dumai bahwa RSUD Kota Dumai merupakan salah satu UPT yang bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kota Dumai. Dengan demikian, total pagu Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 sebesar Rp 205.891.207.862,- terdiri dari pagu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 185,891,858,212.00,- dan pagu untuk BLUD 10 puskesmas dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 19.999.349.650,-.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota Dumai yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 19 dan 20 Maret 2024 di Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung dan hasil inputan pokok pikiran dewan pada aplikasi SIPD, maka

ada 2 usulan pokok pikiran dewan yakni dari Andy Putra Silitonga, SE dan Rudi Hartono, S.Psi yang sama-sama mengusulkan kegiatan pembangunan poskeskel di Kelurahan Teluk Binjai dengan pagu masing-masing sebesar Rp 450.000.000,-. Sehingga total usulan pokok pikiran dewan sebesar Rp 900.000.000,-. Akan tetapi, kegiatan pembangunan poskeskel di Kelurahan Teluk Binjai telah diakomodir pada APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 sehingga ke 2 usulan pokok pikiran dewan tersebut tidak jadi diakomodir pada renja 2025. Selain itu, ada penambahan dana hibah sebesar Rp 850.000.000,- yang dialokasikan untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Dumai sebesar Rp 500.000.000,- dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Dumai sebesar Rp 350.000.000,-. Lebih lanjut, dengan adanya peningkatan angka stunting di Kota Dumai berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menjadi 14.9% dari 12.8% hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, maka ada penambahan anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp 3.400.000.000,- pada renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025. Dengan demikian ada penambahan anggaran sebesar Rp 4.250.000.000,- dari pagu rancangan renja sehingga total pagu Rancangan Akhir (Rankhir) Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai menjadi Rp 210.141.207,862,- terdiri dari pagu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 190.141.858.212,- dan pagu untuk BLUD 10 puskesmas dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 19.999.349.650,-.

Hasil pembahasan anggaran dengan TAPD Kota Dumai, ada penambahan anggaran sebesar Rp 45.238.287.774,- pada pagu Rancangan Akhir (Rankhir) Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai khususnya pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN karena ada penambahan gaji P3K Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Dumai dari semula Rp 107.247.859.698,- bertambah menjadi Rp 152,486,147,472,-. Dengan demikian total pagu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai bertambah menjadi Rp 255.379.495.636,- terdiri dari pagu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 235.380.145.986,- dan pagu untuk BLUD 10 puskesmas dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 19.999.349.650,-. Perincian pagu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.31

2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai akan didiskusikan dalam pembahasan Musrenbang RKPD Kota Dumai. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota Dumai.

Dinas Kesehatan Kota Dumai akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan Tahun 2025 dari kelompok masyarakat yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Dumai maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan melalui pelaksanaan musrenbang kecamatan dan musrenbang RKPD. Usulan kegiatan pembangunan fisik dari masyarakat akan dimasukkan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.

Sesuai dengan prioritas hasil reses DPRD Kota Dumai Tahun 2025, maka ada 2 usulan pokok pikiran dewan untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai yakni dari Andy Putra Silitonga, SE dan Rudi Hartono, S.Psi. Kedua anggota dewan tersebut sama-sama mengusulkan kegiatan pembangunan poskeskel di Kelurahan Teluk Binjai. Akan tetapi kegiatan pembangunan poskeskel di Kelurahan Teluk Binjai telah diakomodir pada APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 yang merupakan hasil usulan prioritas Musrenbang RKPD Kota Dumai Tahun 2023. Dengan demikian ke 2 usulan pokok pikiran dewan tersebut tidak diakomodir pada Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 (lampiran T-C.32).



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai pada hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 yakni "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" guna mencapai Tujuan Bersama Bangsa. Pada tahun 2025, ada 7 prioritas Pembangunan Nasional, dan urusan kesehatan berada pada Prioritas Nasional keempat yakni memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas. Sedangkan arah pembangunan kewilayahan dan provinsi Sumatera dengan tema "mata rantai Utama Bioindustri dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan".

Perbedaan perodesasi antara RPJMD dan RPJMN menyebabkan penyusunan RKPD 2025 dan RKP 2025 berbeda. RKPD masih mempedomani perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada RPJPD 2005-2025. Sedangkan RKP 2025 telah mempedomani RPJPN 2025-2045 dan atau teknokratik RPJMN 2025-2029 dikarenakan RPJMN periode sebelumnya (2020-2024) berakhir di tahun 2024. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai masih mempedomani RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Tahun 2025 merupakan masa transisi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Meskipun RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, namun dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 harus mensinkronkan dan mengakomodir kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya urusan kesehatan.

Berdasarkan hasil Rakortekbang Tahun 2024, arah kebijakan urusan kesehatan Tahun 2025 adalah: 1) penurunan revalensi stunting (lintas K/L); 2) keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate); 3) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI); 4) Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin; 5) Rumah Sakit dan puskesmas terakreditasi paripurna; dan 6) Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak dicapai pada tahun 2026 khususnya dalam rangka mencapai misi 2 mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu, maka dirumuskan tujuan dan dan sasaran pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026. Adapun tujuan pembangunan Kota Dumai berkaitan dengan kesehatan adalah tujuan ketiga "Membangun masyarakat Dumai yang produktif berdaya saing dan sejahtera" dengan sasaran yang terkait dengan kesehatan yakni "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai". Tujuan dan dan sasaran pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan dalam sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah (PD). Sasaran pembangunan Kota Dumai terkait dengan kesehatan tersebut menjadi tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Kota Dumai pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yakni **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan. Sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang diukur dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup.

2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang diukur dengan indikator kinerja Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah Kota Dumai serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai dan Dinas Kesehatan Kota Dumai dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Rencana)					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai		Indeks Kesehatan	0.788	0.789-0.790	0.790-0.791	0.790-0.791	0.791-0.792	
		1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.25 tahun	71.29-71.33 tahun	71.34-71.37 tahun	71.38-71.42 tahun	71.42-71.46 tahun
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	92.2%	97%	100%	100%	100%

Untuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2025, target indikator tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai yang diukur melalui Indeks Kesehatan adalah sebesar 0.790-0.791. Sedangkan target indikator sasaran 1 meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup adalah sebesar 71.38-71.42 tahun, dan target indikator sasaran 2 meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diukur melalui Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai adalah sebesar 100%.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai pada tahun 2026 serta memperhatikan pencapaian hasil pembangunan bidang

kesehatan di Kota Dumai, maka pada tahun 2025 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas pembangunan bidang kesehatan Kota Dumai yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk tahun 2025 masih di prioritaskan pada :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 12 indikator dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan.
2. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) tahun 2025, dengan perhatian khusus sektor kesehatan pada :
 - a. Goal 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun
 - b. Goal 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.
 - c. Goal 3 : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
 - d. Goal 6 : Menjamin Ketersediaan Serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua.
3. Peningkatan keterjangkauan pemerataan dan mutu pelayanan
Masih diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah sulit, pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu dan poskeskel), dan pengadaan peralatan kesehatan (medis dan non medis) untuk puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu dan poskeskel) serta mempertahankan akreditasi puskesmas.
4. Peningkatan dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan
Pemerataan penempatan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu, poskeskel dan polindes) terutama di daerah sulit agar memenuhi standar ketenagaan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Pengentasan kemiskinan
Pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perbaikan gizi masyarakat (pemberian PMT balita dan bumil resti masyarakat miskin), dan sunatan massal untuk masyarakat miskin.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single kode base untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 terdiri dari: Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari **5 program, 24 kegiatan dan 109 sub kegiatan** dengan perincian: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan; dan **Program Urusan Wajib** terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1)	1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD
5	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah
2)	1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
9	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3)	1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
11	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
4)	1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
13	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
14	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5)	1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
15	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
16	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga
18	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor
19	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
21	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
22	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6)	1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
24	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
25	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel
26	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7)	1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
28	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
29	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8)	1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
31	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
9)	1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
32	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Kota
33	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Barat
34	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kapur
35	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Sungai Sembilan

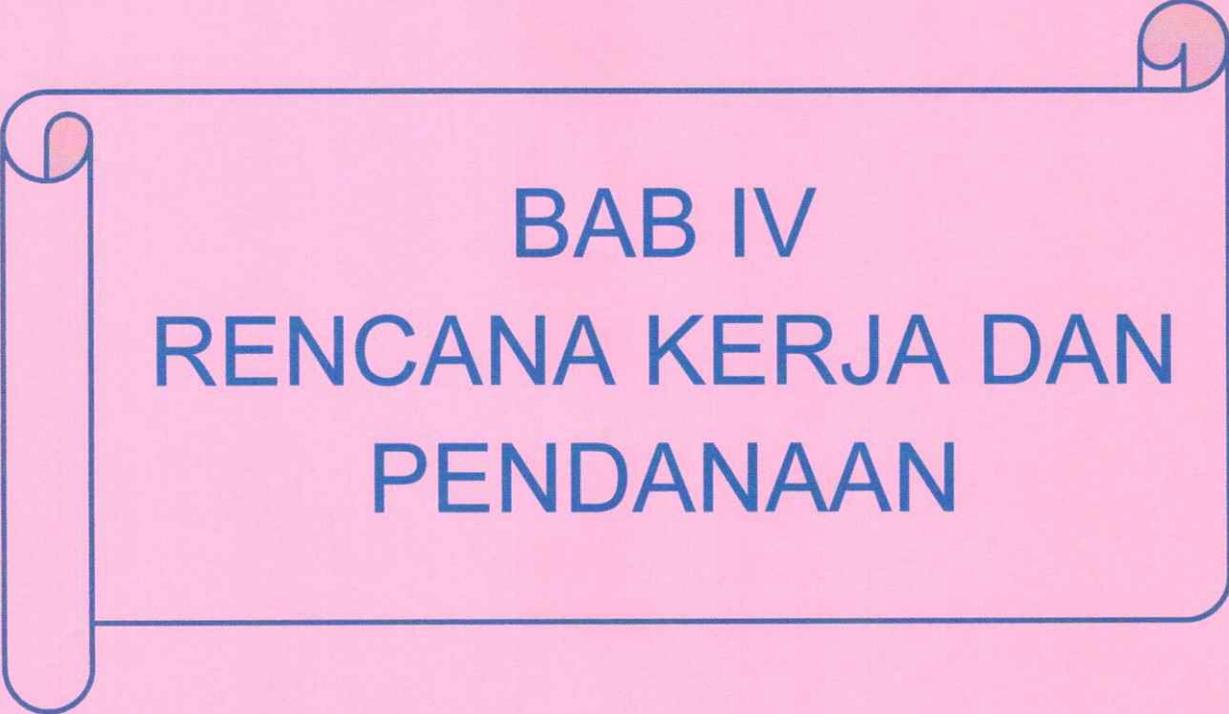
No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
36	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Medang Kampai
37	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bumi Ayu
38	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Timah
39	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jaya Mukti
40	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Purnama
41	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kayu Kapur
42	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A
10)	1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
43	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas
44	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
45	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
46	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan puskesmas
47	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya
48	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
49	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
50	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
51	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan
52	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
53	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
54	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
55	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
11)	1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
56	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
57	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
58	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
59	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
60	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
61	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
62	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
63	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
64	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
65	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
66	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
67	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
68	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
69	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
70	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
71	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
72	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
73	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
74	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan surveilans kesehatan
75	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
76	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
77	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
78	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
79	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/Nasional
80	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
81	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
82	1.02.02.2.02.0033	Operasional pelayanan Puskesmas
83	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
84	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
85	1.02.02.2.02.0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
86	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
87	1.02.02.2.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
88	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
89	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
90	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
91	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Upaya Kesehatan Reproduksi
92	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
12)	1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
93	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi kesehatan
13)	1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
94	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
95	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
96	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
97	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
14)	1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota
98	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
15)	1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
99	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
100	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
16)	1.02.03.2.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
101	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
17)	1.02.04.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
102	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
18)	1.02.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
103	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
19)	1.02.04.2.04	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
104	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)
20)	1.02.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
105	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
21)	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
106	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
22)	1.02.05.2.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
107	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
23)	1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
108	1.02.05.2.02.0002	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
24)	1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
109	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Oleh sebab itu Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2025 dan prakiraan tahun 2025 serta sumber dana kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Dumai dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C 33.



BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

4.1 Rencana Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021–2026, Rencana Kinerja yang di ukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	8
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	10
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	100
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,38-71.42
		2. Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	54
		3. Meningkatkan Status Gizi Balita	%	100
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1
		3.2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	2
		2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai

4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Pagu anggaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 sebesar Rp 255.379.495.636,- terdiri dari pagu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 235.380.145.986,- (termasuk pagu gaji dan tunjangan ASN RSUD Kota Dumai) dan pagu untuk BLUD 10 puskesmas dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 19.999.349.650,-.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 181,303,760,478,- atau sebesar 70.99% dialokasikan untuk Non Urusan. Anggaran Non Urusan dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan 9 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Sedangkan sisanya sebesar Rp 74.075.735.158,- atau sebesar 29.01% dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 4 program, 14 kegiatan serta 53 sub kegiatan. Uraian alokasi anggaran berdasarkan non urusan dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Alokasi Anggaran Berdasarkan Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1.02.01	Kegiatan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
1.02.01.2.01	Kegiatan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	137,463,400.00
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	22,972,000.00
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5,141,000.00
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1,781,000.00
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1,781,000.00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19,709,200.00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	43,520,100.00
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152,486,147,472.00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	152,486,147,472.00
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	53,050,000.00
1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	13,400,000.00
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	15,000,000.00
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	166,166,770.00
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	184,055,540.00
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,027,419,846.00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30,783,500.00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	307,571,100.00
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	27,488,914.00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	55,395,000.00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65,115,532.00
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000.00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	473,529,800.00
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64,536,000.00
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	250,000,000.00
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	150,000,000.00
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100,000,000.00
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	5,674,240,000.00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	379,600,000.00
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	458,640,000.00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4,736,000,000.00
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	702,563,500.00
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	702,563,500.00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	600,000,000.00
1.02.01.2.10	Kegiatan Pembinaan Pelayanan BLUD	19,997,335,000.00
1.02.01.2.10.0001 0002	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Kota	2,542,813,000
1.02.01.2.10.0001 0003	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Barat	1,750,000,000
1.02.01.2.10.0001 0004	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1,786,500,000
1.02.01.2.10.0001 0005	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	3,063,345,000
1.02.01.2.10.0001 0006	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Medang Kampai	1,429,618,000
1.02.01.2.10.0001 0007	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1,520,000,000
1.02.01.2.10.0001 0008	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Timah	966,000,000
1.02.01.2.10.0001 0009	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Purnama	1,650,000,000
1.02.01.2.10.0001 0010	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Jaya Mukti	3,252,098,850
1.02.01.2.10.0001 0011	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1,824,950,000
1.02.01.2.10.0001 0012	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A	214,024,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja (Rp)
1	2	3
	REKORDAY PERIKLTIKHAAN UPAYA KESEHATAN BERORIENTASIAN MANIPRAYA	
	KESEHATAN MASYARAKAT	
	Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	
	Kecamatan/ Kelurahan/ SubKecamatan	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	12,000,000,000.00
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	400,000,000.00
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	1,300,000,000.00
1.02.02.2.01.0005	Pengembangan puskesmas	2,540,000,000.00
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	614,000,000.00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	1,015,000,000.00
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	1,400,000,000.00
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	200,000,000.00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	1,985,292,500.00
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	100,205,000.00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100,600,000.00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2,600,000,000.00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	80,000,000.00
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,169,373,500.00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	165,075,250.00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	328,697,250.00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	144,816,100.00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	155,260,000.00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	83,098,580.00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	129,160,570.00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	31,069,200.00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,000,000.00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100,000,000.00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	85,000,000.00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100,000,000.00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100,000,000.00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	563,000,000.00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	185,015,500.00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	55,569,200.00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan surveilans kesehatan	339,999,900.00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	380,000,000.00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	34,876,746,200.00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	29,999,900.00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganangan gawat darurat terpadu (SPGDT)	832,728,700.00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	100,000,000.00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	50,000,000.00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	22,000,000.00
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	185,772,000.00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi kesehatan	185,772,000.00
1.02.02.2.04	Kegiatan Renerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,651,373,200.00
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	55,924,000.00
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	60,000,000.00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	272,307,200.00

Dinas Kesehatan Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Renja (Rp)
1	2	3
1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	27.000.000,00
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	27.000.000,00
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penedyagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.666.400.000,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.666.400.000,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	86.282.400,00
1.02.04	PROGRAM SERTIFIKASI FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	602.499.800,00
1.02.04.2.01	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	46.974.000,00
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	46.974.000,00
1.02.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	104.164.158,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	104.164.158,00
1.02.04.2.04	Kegiatan Penerbitan Sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	134.499.800,00
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan maakanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	134.499.800,00
1.02.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Striker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	115.484.800,00
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	115.484.800,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Pengawasan serta tindak lanjut pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	49.498.900,00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	49.498.900,00
1.02.05	PROGRAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	302.123.500,00
1.02.05.2.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	130.123.500,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	130.123.500,00
1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan serta dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	159.647.500,00
1.02.05.2.02.0002	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	159.647.500,00
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	214.043.800,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	214.043.800,00



BAB V
PENUTUP

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Kota Dumai serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menjaga sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai.
2. Sebagai pedoman dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas kesehatan Kota Dumai berkewajiban untuk melaksanakan program- program Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

5.2. Rencana tindak lanjut.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dumai, Juli 2024


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI
Dr. SYAIFUL, MKM
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 197107242001121004



LAMPIRAN
TABEL T-C.29

TABEL T-C. 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024 KOTA DUMAI**

Nama OPD : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Lembar:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 dokumen	24 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100%	28 dokumen		
1.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%			
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen					7 dokumen		
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen					2 dokumen		
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen					2 dokumen		
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen					2 dokumen		
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen					2 dokumen		
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan					4 laporan		
1.02.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 laporan	9 laporan	9 laporan	100%			
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan					9 laporan		
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 dokumen					2 dokumen		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		508 orang/bulan	550 orang/bulan	531 orang/bulan	96.55%			
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 orang/bulan					600 orang/bulan		
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%			
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan					2 Laporan		
1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dokumen					4 dokumen		
1.02.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen					2 dokumen		
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%			
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan					2 laporan		
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawalan Perangkat Daerah		451 orang	550 orang	550 orang	100%			
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen					1 dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		9 orang	9 orang	5 orang	55.6%			
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang					9 orang		
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen					3 dokumen		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor		1 paket	1 paket	1 paket	100%			
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	1 paket					1 paket		
1.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	3 paket	3 paket	100%			
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket					3 paket		
1.02.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 paket	3 paket	3 paket	100%			
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket					3 paket		
1.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 paket	2 paket	2 paket	100%			
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket					2 paket		
1.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 paket	3 paket	3 paket	100%			
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket					3 paket		
1.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan					1 laporan		
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16 unit	38 unit	38 unit	100%			
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 unit					37 unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 unit	1 unit	100%			
1.02.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit	25 unit	25 unit	100%			
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit					25 unit		
1.02.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 unit	12 unit	12 unit	100%			
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit					12 unit		
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan					3 Laporan		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan					1 laporan		
1.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan					1 laporan		
1.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan					1 laporan		
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		16 unit	18 unit	18 unit	100%			
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 unit					19 unit		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 unit	17 unit	17 unit	100%			
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit					18 unit		
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	1 unit	1 unit	100%			
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit					1 unit		
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD		11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	100%			
		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja					11 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Kota	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Kota	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Barat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Barat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Medang Kampai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Medang Kampai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Timah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Timah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Purnama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Purnama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja					1 unit kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	86,26%	82%	89,47%	100%	84%	260%	65%
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP	12 sarana	12 sarana	12 sarana	12 sarana	100%	12 sarana		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun		0 unit	1 unit	1 unit	100%			
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	1 unit					1 unit		
1.02.02.2.01.03	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun		0 unit	1 unit	1 unit	100%			
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	4 unit					4 unit		
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun		0 unit	0 unit	0 unit				
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	2 unit					2 unit		
1.02.02.2.01.06	Pengembangan puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar		0 unit	5 unit	5 unit	100%			
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	5 unit					5 unit		
1.02.02.2.01.07	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar		0 unit	9 unit	9 unit	100%			
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	155 unit					155 unit		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		8 unit	5 unit	5 unit	100%			
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit					5 unit		
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		8 unit	7 unit	7 unit	100%			
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 unit					10 unit		
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		0 unit	0 unit	0 unit				
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 unit					2 unit		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		5 unit	7 unit	7 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		10 unit	117 unit	117 unit	100%			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	150 unit					150 unit		
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance		337 unit	285 unit	285 unit	100%			
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance	290 unit					290 unit		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan obat, vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		1 paket	1 paket	1 paket	100%			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		3 paket	3 paket	3 paket	100%			
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		10 unit	10 unit	10 unit	100%			
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 unit					10 unit		
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		10 Paket	0 Paket	0 Paket				
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4 paket					4 paket		
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	10 Paket					10 Paket		
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	10 puskesmas	10 puskesmas	10 puskesmas	100%	10 puskesmas		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8.498 orang	9.590 orang	8.688 orang	90.59%			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.581 orang					9.581 orang		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8.101 orang	9.154 orang	8.319 orang	90.88%			
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.145 orang					9.145 orang		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7.918 orang	8.718 orang	8.166 orang	93.67%			
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.710 orang					8.710 orang		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		31.460 orang	44.931 orang	38.172 orang	84.96%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.178 orang					36.178 orang		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		51.785 orang	55.082 orang	41.397 orang	75.16%			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60.966 orang					60.966 orang		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		167.598 orang	209.297 orang	196.643 orang	93.95%			
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209.094 orang					209.094 orang		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12.924 orang	15.356 orang	14.382 orang	93.66%			
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.341 orang					15.341 orang		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		33.349 orang	72.563 orang	38.374 orang	52.89%			
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.492 orang					72.492 orang		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3.540 orang	3.819 orang	3.736 orang	97.83%			
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.815 orang					3.815 orang		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		481 orang	498 orang	531 orang	100%			
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	503 orang					503 orang		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		11.605 orang	8.208 orang	14.344 orang	100%			
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.034 orang					8.034 orang		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		7.907 orang	9.851 orang	11.368 orang	100%			
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.228 orang					9.228 orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen					4 dokumen		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			821 orang	614 orang	74.79%			
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	903 orang					903 orang		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			5 orang	1 orang	20%			
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 orang					8 orang		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 paket	1 paket	100%			
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket					1 paket		
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.02.2.02.30	Penyediaan telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas		5 unit	0 unit	0 unit				
1.02.02.2.02.33	Operasional pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%			
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		0 Unit	0 Unit	0 Unit				
1.02.02.2.02.36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1 Laporan	100%			
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		0 Unit	1 unit	1 unit	100%			
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit					1 unit		
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas		68.196 keluarga	0 keluarga	0 keluarga				
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1.490 orang	1.490 orang	100%			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.488 orang					1.488 orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	609 orang					609 orang		
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			2 orang	6 orang	300%			
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 orang					2 orang		
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	12 sarana	11 sarana	11 sarana	11 sarana	100%	12 sarana		
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%			
1.02.02.2.03.03	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan		5 unit	1 unit	1 unit	100%			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 dokumen					8 dokumen		
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	103 sarana	101 sarana	102 sarana	102 sarana	100%	103 sarana		
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Penzinannya		16 unit	17 unit	17 unit	100%			
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Penzinannya	18 unit					18 unit		
1.02.02.2.04.02	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		75 unit	75 unit	75 unit	100%			
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	75 unit					75 unit		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		11 unit	11 unit	11 unit	100%			
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 unit					11 unit		
1.02.02.2.04.04	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dokumen					2 dokumen		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	84%	80%	83%	100%	100%	84%	264%	66%
1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota	Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	30 tempat	25 tempat	25 tempat	25 tempat	100%	30 tempat		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.03.2.01.01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	10 puskesmas	10 puskesmas	10 puskesmas	10 puskesmas	100%	10 puskesmas		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	325 Orang					325 Orang		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen					2 dokumen		
1.02.03.2.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	5 kegiatan		9 kegiatan	9 kegiatan	100%	5 kegiatan		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya			400 orang	400 orang	100%			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	150 orang					150 orang		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	80%	59.83%	79%	77.95%	98.67%	80%	218%	54.50%
1.02.04.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	117 sarana	115 sarana	116 sarana	116 sarana	100%	117 sarana		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%			
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 dokumen					3 dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	50 sarana	50 sarana	50 sarana	50 sarana	100%	50 sarana		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.04.2.04	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen		
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%			
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 dokumen					4 dokumen		
1.02.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen					1 dokumen		
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		30 unit	30 unit	30 unit	100%			
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 unit					30 unit		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	4.50	4.68	4.41	94.23%	4.68	13.59	3.40
1.02.05.2.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelurahan siaga aktif	36 kelurahan	36 kelurahan	36 kelurahan	36 kelurahan	100%	36 kelurahan		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%			
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 dokumen					6 dokumen		
1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS	38.262 rumah tangga	30.688 rumah tangga	34.439 rumah tangga	36.674 rumah tangga	100%	38.262 rumah tangga		
1.02.05.2.02.02	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat		0 keluarga	34.439 keluarga	36.674 keluarga	100.00%			
1.02.05.2.02.0002	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	38.262 keluarga					38.262 keluarga		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu	194 posyandu	195 posyandu	197 posyandu	100%	196 posyandu		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen					3 dokumen		



LAMPIRAN
TABEL T-C.30

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas kesehatan
Kota Dumai

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rencana				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)											
1.1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH		√	17	8	8	7,8	11,36	0	8	7,8	
1.2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH		√	24	11	10	10	13,42	0	10	10	
1.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH		√	101	100,5	100	100	103,23	0	100	100	
1.4	Umur harapan hidup			71,29-71,33	71,34-71,37	71,38-71,42	71,42-71,46	71,67	0	71,38-71,42	71,42-71,46	
2	Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)											
2.1	Angka Kesakitan Malaria (AMI) per 1.000 penduduk		√	0,8	0,1	0,1	0,1	0,01	0	0,1	0,1	
2.2	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +		√	86	88	88	88	72	0	88	88	
2.3	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko			< 1	< 1	< 1	< 1	0,18	0	< 1	< 1	
2.4	Angka kesakitan demam berdarah (DBD) per 100.000 penduduk		√	55	54	54	54	198,03	0	54	54	
3	Meningkatnya Status Gizi Balita											
3.1	Persentase balita dengan gizi buruk			1	1	1	1	0,07		1	1	
3.2	Persentase balita dengan gizi kurang		√	3	2	2	2	1,1	0	2	2	
4	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			97	100	100	100	100,02	0	98	100	
5		Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	√	100	100	100	100	90,59	0	100	100	
6		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100	100	100	100	90,66	0	100	100	
7		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√	100	100	100	100	93,67	0	100	100	
8		Pelayanan Kesehatan Balita	√	100	100	100	100	64,96	0	100	100	
9		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		100	100	100	100	75,16	0	100	100	
10		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		100	100	100	100	93,65	0	100	100	
11		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		100	100	100	100	93,66	0	100	100	
12		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100	100	100	100	52,89	0	100	100	
13		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		100	100	100	100	97,83	0	100	100	
14		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat		100	100	100	100	100	0	100	100	
15		Pelayanan Kesehatan orang dengan Tarduga Tuberkulosis		100	100	100	100	100	0	100	100	
16		Pelayanan Kesehatan orang beseriko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)		100	100	100	100	100	0	100	100	

Belum ada realisasi



LAMPIRAN
TABEL T-C.31

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025 KOTA DUMAI

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	63,663,201,229.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	161,304,410,828.00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 dokumen	232,367,700.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 dokumen	232,367,700.00	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	137,463,400.00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	137,463,400.00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	22,972,000.00	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	22,972,000.00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5,141,000.00	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5,141,000.00	
	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000.00	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000.00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000.00	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000.00	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	19,709,200.00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	19,709,200.00	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	43,520,100.00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	43,520,100.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 dokumen	55,150,987,040.00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 dokumen	152,539,197,472.00	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 orang/bulan	55,097,937,040.00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.370 orang/bulan	152,486,147,472.00	Penambahan gaji P3K dan penyesuaian kenaikan gaji ASN serta pemindahan gaji dan tunjangan ASN RSUD Kota Dumai. Ada penambahan anggaran lagi sebesar 45.238.287.774,- untuk penambahan gaji P3K Dinkes dan RSUD Kota Dumai
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53,050,000.00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53,050,000.00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dokumen	28,400,000.00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dokumen	28,400,000.00	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	13,400,000.00	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	13,400,000.00	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15,000,000.00	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15,000,000.00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	350,222,310.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	350,222,310.00	
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	166,166,770.00	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	166,166,770.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	184,055,540.00	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	184,055,540.00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen	1,027,419,846.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen	1,027,419,846.00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	30,783,500.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	30,783,500.00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	307,571,100.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	307,571,100.00	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	27,488,914.00	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	27,488,914.00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	55,395,000.00	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	55,395,000.00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	65,115,532.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	65,115,532.00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,000,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	473,529,800.00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	473,529,800.00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	64,536,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	64,536,000.00	